

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

### BAB I PENDAHULUAN

#### I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Ternate menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate selama Tahun anggaran 2015 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Ternate serta hasil-hasil yang dicapai;

4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Ternate berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2015.

## **I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

- Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor18);
  13. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 42 );
  14. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 196); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2015 ( Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 242 A )
  15. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 195).

### **I.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **I.3.1. Unsur Laporan Keuangan**

LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Ternate, yang terdiri dari PPKD (BUD) dan SKPD. LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

##### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

##### **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

##### **3. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

##### **4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas

akhir.

#### **5. Neraca**

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

#### **6. Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2015.

#### **7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan keuangan BUD. Laporan keuangan SKPD dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan BUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **I.3.2 Entitas**

Untuk Tahun Anggaran 2015, entitas dalam Pemerintah Kota Ternate yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate meliputi:

a. Entitas Akuntansi:

1. Dinas Pendidikan
2. Sanggar Kegiatan Belajar
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Pemadam Kebakaran
6. Dinas Tata Kota
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
8. Dinas Perhubungan dan Kominfo
9. Dinas Kebersihan
10. Badan Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

12. Kantor Pemberdayaan Perempuan
13. Badan Pengendalian Kependudukan dan KB Daerah
14. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
15. Dinas Koperasi dan UKM
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Dinas Pemuda dan Olahraga
18. Satuan Polisi Pamongpraja
19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
23. Inspektorat
24. Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu
25. Kecamatan Ternate Utara
26. Kecamatan Ternate Selatan
27. Kecamatan Pulau Ternate
28. Kecamatan Pulau Moti
29. Kecamatan Ternate Tengah
30. Kecamatan Batang Dua
31. Kecamatan Pulau Hiri
32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33. Dinas Pendapatan
34. Badan Kepegawaian Daerah
35. Badan Pemberdayaan Masyarakat
36. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
37. Dinas Pertanian dan Kehutanan
38. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Perikanan
39. Dinas Kelautan dan Perikanan
40. Dinas Pasar
41. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

LKPD Kota Ternate TA 2015 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD dan PPKD (BUD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

LKPD tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### **I.3.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

## 1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LP SAL disajikan berdasarkan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. LP SAL disajikan pada entitas akuntansi PPKD (BUD) dan entitas pelaporan. Penyajian LP SAL mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

## 2. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama tahun anggaran 2015 dengan menelusuri baik transaksi kas dan transaksi non kas. Penyajian Laporan Operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2014. Laporan operasional yang disajikan tidak selalu terpaku pada struktur APBD Pemerintah Kota Ternate, sehingga bisa saja terdapat perbedaan penyajian satu transaksi pada LRA dan LO, contohnya adalah penyajian penerimaan hasil lelang dari aset daerah yang sudah dihapuskan, penyajian penerimaan dan pengeluaran hibah, dan sebagainya.

## 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Perubahan ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama tahun anggaran 2015. Penyajian LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

## 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

### I.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate disajikan dengan urutan sebagai berikut:

#### Bab I      Pendahuluan

- I.1.      Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2.      Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3.      Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.4.      Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

#### Bab II     Ekonomi Makro

- II.1.     Ekonomi Makro
- II.2.     Kebijakan Keuangan Daerah

	II.3.	Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Ternate
	II.4.	Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate
Bab III		Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal
	III.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
	III.2.	Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja
Bab IV		Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate
	IV.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate
	IV.2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
Bab V		Kebijakan Akuntansi
	V.1.	Entitas Pelaporan
	V.2.	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	V.3.	Kebijakan Akuntansi
Bab VI		Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	VI.1.	Pendapatan -LRA
	VI.2.	Belanja
	VI.3.	Transfer
	VI.4.	Surplus/Defisit
	VI.5.	Pembiayaan
	VI.6.	Komponen-komponen Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	VI.7.	Pendapatan –LO
	VI.8.	Beban
	VI.9.	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
	VI.10.	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
	VI.11.	Pos Luar Biasa
	VI.12.	Surplus/Defisit Laporan Operasional
	VI.13.	Komponen Perubahan Ekuitas
	VI.14.	Aset
	VI.15.	Kewajiban
	VI.16.	Ekuitas
	VI.17.	Komponen-komponen Arus Kas
Bab VII		Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab VIII		Penutup

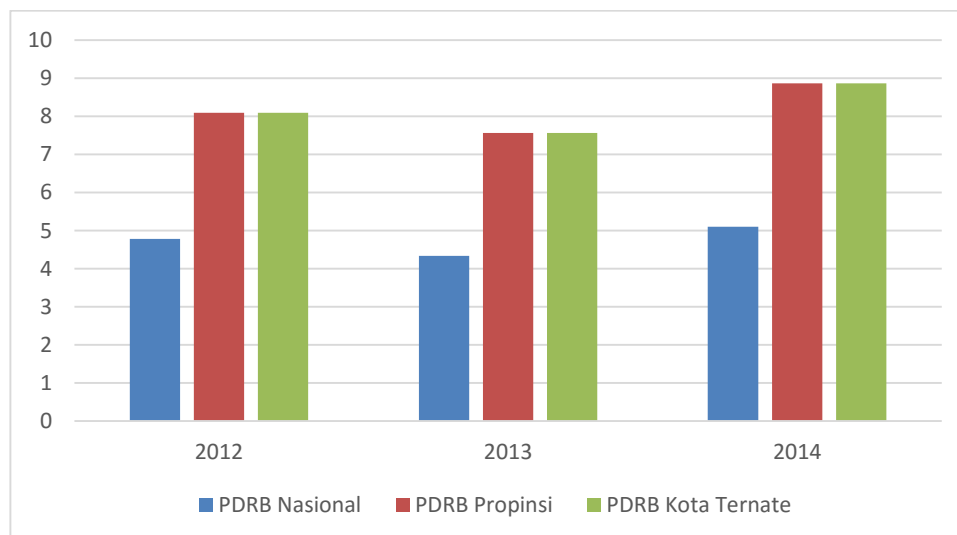
## BAB II EKONOMI MAKRO

### 2.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflector kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Ternate Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

#### 1. Relatif terjaganya stabilitas ekonomi dengan baik

Tercermin dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate yang dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ternate berdasarkan harga konstan dalam 3 tahun terakhir (2012-2014)



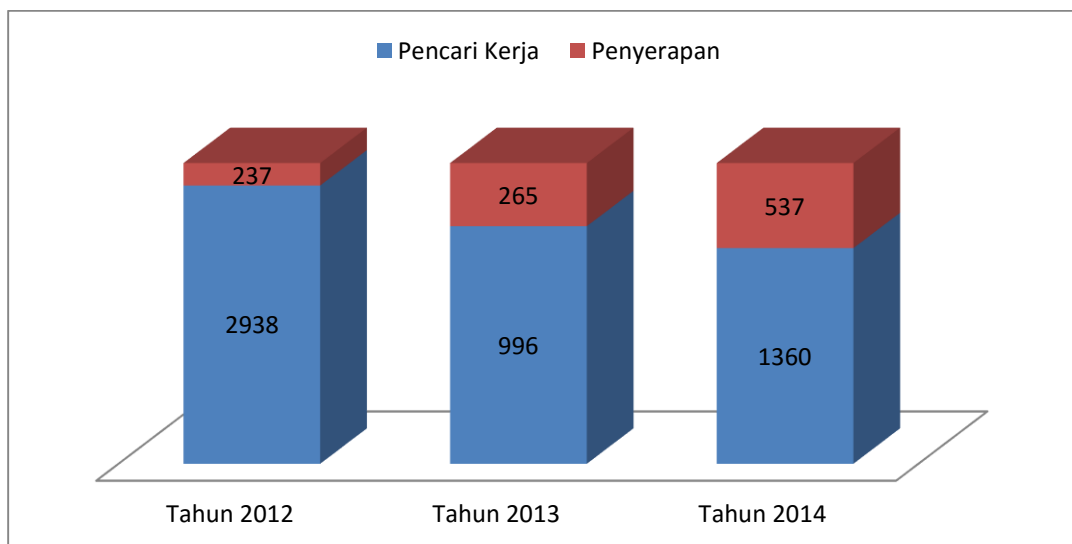
Berdasarkan grafik di atas perkembangan PDRB Kota Ternate dapat dilihat bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 (Angka sangat sementara), PDRB Kota Ternate mengalami kenaikan dan berada di atas PDRB Nasional, Sehingga dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi



Kota Ternate selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan sedikit lebih baik dibandingkan dengan laku pertumbuhan nasional.

2. Kemampuan ekonomi untuk memperluas lapangan kerja

Sebagai Kota yang memiliki karakteristik perdagangan dan kegiatan jasa, maka penanganan permasalahan ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Pada Tahun 2014 banyaknya pencari kerja terdaftar di Kota Ternate adalah sebanyak 1.360 orang, pada tahun 2013 sebanyak 996 orang, dan pada tahun 2012 sebanyak 2.938 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 adalah sebanyak 537 orang, tahun 2013 tenaga kerja yang diserap adalah sebanyak 265 orang dan tahun 2012 sebanyak 237 orang. (data dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota ternate)



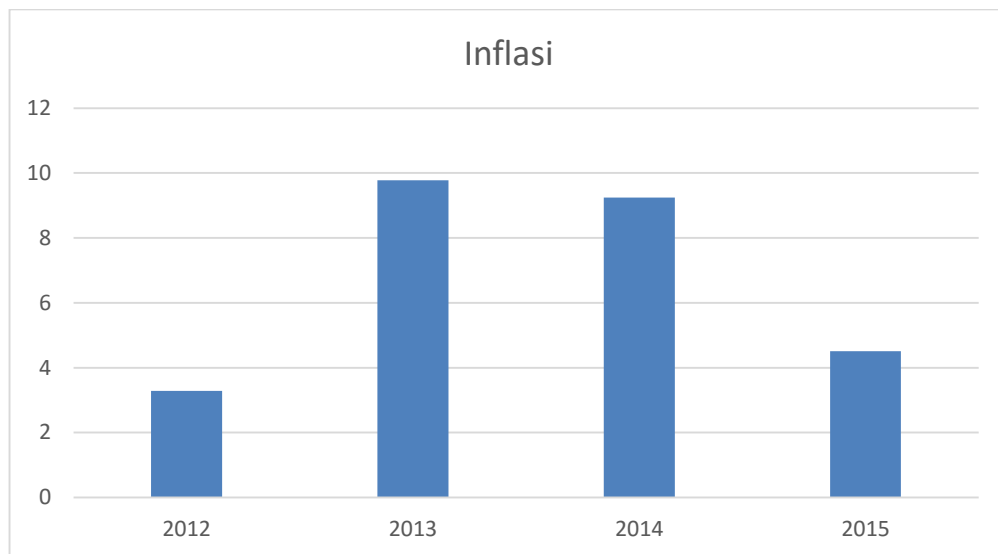
*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate.*

Dengan melihat perkembangan yang ada, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan ekonomi dalam kurun waktu 2012-2014 diperkirakan telah mampu meningkatkan banyaknya lowongan kerja yang dapat diisi oleh tenaga kerja, dan menurunnya jumlah pencari kerja dari tahun 2012 sampai Tahun 2014.

### 3. Tingkat Perubahan Harga(Inflasi)

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan agregat makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan distribusi pendapatan.

Inflasi dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan Indeks harga Konsumen (IHK) yang dalam konteks regional dipengaruhi terutama oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan factor musiman (hari raya, dan tahun baru). Berikut disajikan data perkembangan inflasi dari tahun 2012 sampai 2015.

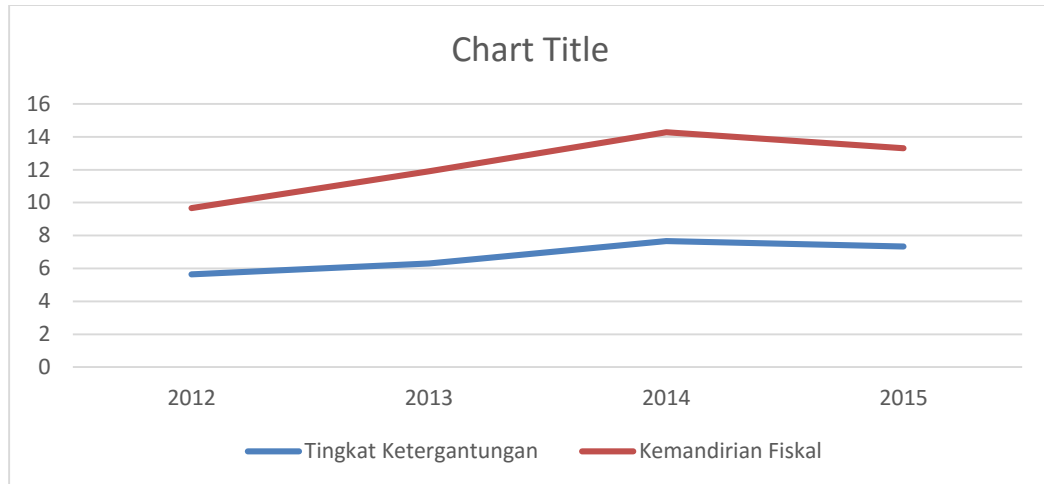


Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa inflasi di Kota Ternate dalam kurun waktu 2012 – 2015 relatif meningkat.

### 4. Kemandirian ekonomi daerah

Kemandirian ekonomi daerah Kota Ternate dapat dilihat pada grafik di atas yang relative belum meningkatnya kemampuan fiskal daerah dari tahun ke tahun. Kemampuan fiskal daerah ini dapat dilihat dari (1) rasio ketergantungan daerah-pusat yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah (minimal 20%) dan (2) tingkat kemampuan daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Tidak Langsung (minimal 100%). Berdasarkan grafik terlihat bahwa tingkat ketergantungan Kota Ternate terhadap Pemerintah Pusat diantara tahun 2012 – 2015 secara rata-rata masih di bawah 10% dan tingkat kemandirian keuangan daerah sejak tahun 2012 – 2015 masih di

bawah 100% yaitu rata-rata masih di bawah 11%.



## 2. 2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan daerah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, namun juga diperlukan untuk meningkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan.

### 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan dalam bidang Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan melalui upaya stabilisasi dan/atau peningkatan Dana Transfer, dan dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Daerah antara lain:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Peningkatan koordinasi dan pelibatan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mengacu

- pada perencanaan yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran. Dan capaiannya berdasarkan indicator dan tolak ukur yang digunakan ;
- c. Peningkatan efisiensi, efektifitas, profesionalitas, dan proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - d. Peningkatan Kapasitas , kompetensi , kreatifitas dan inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - e. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui kerjasama dan kemitraan (partnership) dengan berbagai pihak yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (*openness*) dan keadilan (*fairness*) serta tidak memberatkan masyarakat;
  - f. Pengkajian dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan dalam rangka percepatan dan pelancaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan yang bersifat *reviewing* terhadap peraturan perundangan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - g. Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun system dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh Teknologi Informasi;

## **2. Dana Perimbangan**

- a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal;
- b. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Dana Bagi Hasil seperti pemungutan PBB, PPh 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
- c. Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen dan variable dalam penghitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

- Khusus (DAK) seperti: data jumlah penduduk (terutama jumlah penduduk miskin), jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita, dan indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- d. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Kota Ternate, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya peningkatan Dana Perimbangan.

### **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- a. Pendekatan dengan Pihak Provinsi dan upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Utara dalam upaya peningkatan kerjasama pembangunan regional (upaya pengembangan kerjasama wilayah).

#### **2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan Belanja Daerah merupakan kebijakan yang mengatur kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum layak pakai serta pengembangan jaminan sosial. Kebijakan belanja daerah secara lebih khusus terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang mengalami peningkatan sebesar 11,72% diantaranya adalah:

1. Pada kebijakan Belanja Tidak Langsung (dari pos tambahan penghasilan guru dan pos tunjangan profesi guru PNSD)
2. Peningkatan Belanja Langsung sampai dengan 10,28 % dengan sasaran pada kepentingan publik sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek rasionalitas dan proporsionalitas pada belanja pegawai , belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

### 2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah merupakan yang mengatur semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Semua penerimaan yang dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

### 2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA APBD KOTA TERNATE

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Ternate memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2015. Penetapan capaian kinerja fiskal Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 dan yang kedua adalah melalui Perda Nomor 02 Tahun 2015 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

URAIAN	APBD	APBD	Perubahan	
		PERUBAHAN	Rp	%
<b>I</b>	812.541.144.000	828.153.848.594	15.612.704.594	1.92
I.1. PAD	60.808.000.000	64.658.500.000	3.850.500.000	6.33
I.2. Dana Perimbangan	639.964.287.000	639.297.411.412	(666.875.588)	(0.10)
I.3. Lain2 Pendapatan yang Sah	111.768.857.000	124.197.937.182	12.429.080.182	11.12
<b>II Belanja</b>	857.833.863.580	875.995.832.509	18.161.968.929	2.12
II.1 Belanja Tidak Langsung	461.593.632.535	478.829.942.480	17.236.309.945	3.73
II.2 Belanja Langsung	396.240.231.045	397.165.890.029	925.658.984	0.23
<b>Surplus/Defisit</b>	(45.292.719.580)	(47.841.983.915)	(2.549.264.335)	3.63
<b>III Pembiayaan</b>	57.992.719.580	60.541.983.915	2.549.264.335	4.94
III.1 Penerimaan	51.642.719.580	54.191.983.915	2.549.264.335	4.94
III.2 Pengeluaran	6.350.000.000	6.350.000.000	-	-
<b>SilPA Tahun Berjalan</b>	-	-	-	-

### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TERNATE

### III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJAFISKAL

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2015 anggaran Belanja Daerah Kota Ternate ditetapkan sebesar Rp875.995.832.509,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp64.658.500.000,00, Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebesar Rp639.297.411.412,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp124.197.937.182,00, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran yang sebesar Rp47.841.983.915,00 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan rencana pinjaman daerah.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Ternate selama Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel III.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015**

Uraian	Target	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
I. Pendapatan	828.153.848.594,00	817.617.739.008,08	(10.536.109.585,92)	98,73
I.1. Pendapatan Asli Daerah	64.658.500.000,00	60.927.816.606,08	(3.730.683.393,92)	94,23
I.2. Dana Perimbangan	639.297.411.412,00	756.638.994.464,00	117.341.583.052,00	118,35
I.3. lain2 Pendapatan Yang Sah	124.197.937.182,00	50.927.938,00	(124.147.009.244,00)	0,04
II. Belanja	875.995.832.509,00	831.370.455.459,44	(44.625.377.049,56)	94,91
II.1. Belanja Tidak Langsung	478.829.942.480,00	457.862.429.511,00	(20.967.512.969,00)	95,62
II.2. Belanja Langsung	397.165.890.029,00	373.508.025.948,44	(23.657.864.080,56)	94,04
Surplus/Defisit	(47.841.983.915,00)	(13.752.716.451,36)	34.089.267.463,64	28,75
III. Pembiayaan	47.841.983.915,00	12.377.365.805,70	(35.464.618.109,30)	25,87
III.1. Penerimaan	54.191.983.915,00	18.227.365.805,70	(35.964.618.109,30)	33,63
III.2. Pengeluaran	6.350.000.000,00	5.850.000.000,00	(500.000.000,00)	92,13
SILPA Tahun Berjalan	0	(1.375.350.645,66)	(1.375.350.645,66)	#DIV/0!

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp817.617.739.008,08 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp828.153.848.594,00 atau 98,73%.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2010 sampai dengan 2015 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3 dan Grafik 5 berikut ini:

**Tabel III.2. Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2011 – 2015**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	% Perkembangan	
			Target	Realisasi
2011	32.200.000.000,00	31.318.111.818,00		
2012	38.435.000.000,00	32.907.344.834,00	19.36	5.07
2013	43.535.000.000,00	40.572.363.457,00	13.27	18.89
2014	54.493.884.000,00	57.765.211.341,94	25.17	29.76
2015	64.658.500.000,00	60.927.816.606,08	15.72	0.22

Secara Keseluruhan dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2015 baik target maupun realisasi PAD Kota Ternate terus menerus mengalami kenaikan.

Dilihat dari sisi target anggaran, dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp6.235.000.000 milyar atau 19,36%, dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp5,100.000.000 milyar atau 13,27%, dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan Rp10,958.884.000 milyar atau 25,17%, dan tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan Rp10,164.616.000 milyar atau 15,72%.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp1.589,233.016 milyar atau 5,07%, kenaikan sebesar Rp7,665,048,623 milyar atau 18,89% terjadi dari tahun anggaran 2012 sampai tahun anggaran 2013, kemudian tahun anggaran 2013 sampai tahun anggaran 2014 sebesar Rp17.192.847.884,94 milyar atau 29,76% dan terakhir tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp124.985.382,44 milyar atau 0,22%.

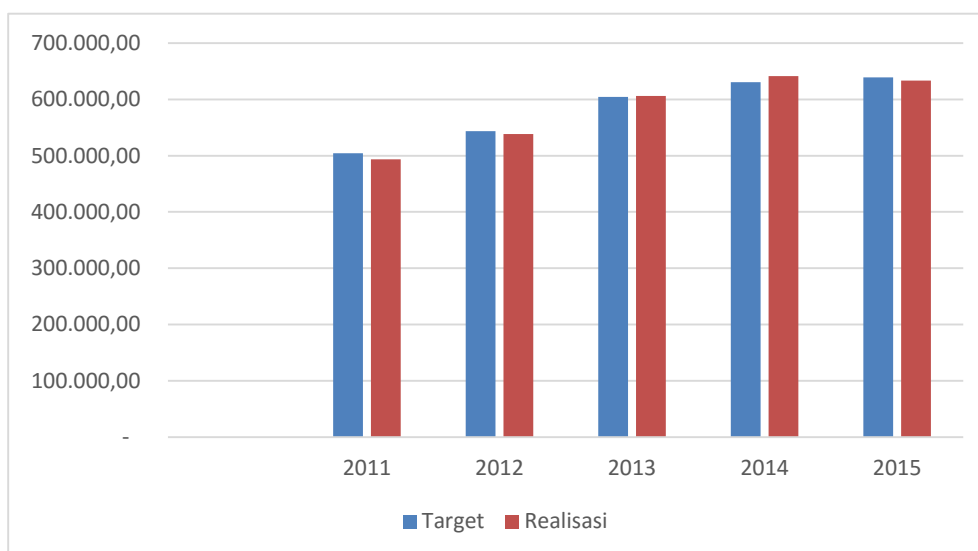
Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp817.593.427.507,00 (98,72%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp828.153.848.594,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 secara jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



**Tabel III.3. Perkembangan Dana Perimbangan  
Tahun Anggaran 2011 – 2015**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Perkembangan	
			Target	Realisasi
2011	504.149.031.800,00	493.702.871.653,00		
2012	543.343.142.000,00	538.753.884.271,00	7.77	9.13
2013	604.418.367.000,00	606.008.253.543,00	11.24	12.48
2014	630.640.109.000,00	641.592.436.975,00	4.16	5.87
2015	639.297.411.412,00	633.647.253.093,00	1.37	-1.24

**Grafik III.1. Perkembangan Dana Perimbangan  
Tahun Anggaran 2011 – 2015 (dalam milyar rupiah)**



Untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target penerimaan sebesar Rp124.197.937.182,00 dapat direalisasikan sebesar Rp122.991.741.371,00 atau 99,03%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

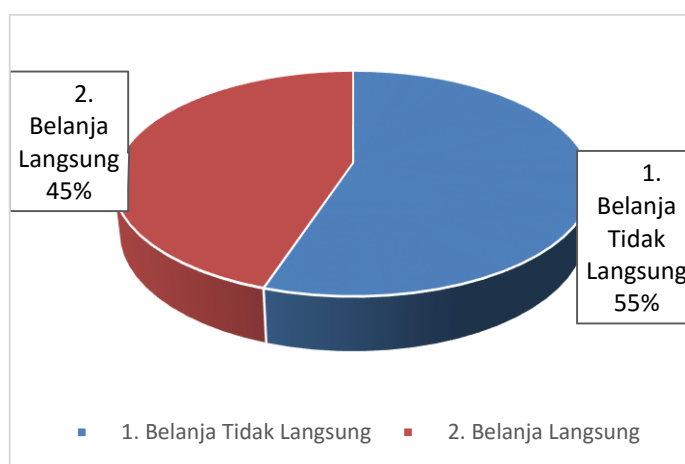
1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh

pemerintah; dan

5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah, pada Tahun Anggaran 2015 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp875.995.832.509,00 dan direalisasikan sebesar Rp831.370.455.459,44 atau 94,81% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp45.514.734.408,56 atau 5,19%.

**Grafik III.2. Persentase Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap APBD Tahun Anggaran 2015**



Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp479.379.942.480,00 dan Dana yang direalisasikan sebesar Rp457.862.429.511,00 atau sebesar 95,51%. Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas:

**Tabel III.4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2015**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	434.066.332.76000	414.078.619.791.00	95.40
2	Belanja Hibah	32.100.000.000.00	31.500.000.000.00	98.13
3	Belanja Bantuan Sosial	5.400.500.000.00	5.400.500.000.00	100.00
4	Belanja bantuan Keuangan Kab./Kota dan pemerintah Desa	813.109.720.00	813.109.720.00	100.00
5	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000.00	6.070.200.000.00	86.72
<b>Jumlah</b>		<b>479.379.942.480.00</b>	<b>457.862.429.511.00</b>	<b>95.51</b>

Belanja langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program. Pada tahun anggaran 2015, Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp397.505.247.388,00 dan terealisasi sebesar Rp373.508.280.948,44 atau 93,96%, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel III.5.Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2015**

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	66.322.000.257.00	62.897.433.156.00	94.84
2	Belanja Barang Dan Jasa	174.071.145.151.00	160.375.530.058.44	92.13
3	Belanja Modal	157.112.101.980.00	150.235.317.734.00	95.62
<b>Jumlah</b>		<b>397.505.247.388.00</b>	<b>373.508.280.948.44</b>	<b>93.96</b>

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp54.191.983.915,00 dapat direalisasikan sebesar Rp18.227.365.805,70 atau 33,63%, realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.

### **III.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2015 yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;
2. Belum optimalnya kinerja Kerjasama Informasi dan Media Massa dalam jumlah kerjasama bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi yang berasal dari media elektronik dibandingkan dengan media cetak;
3. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
4. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
5. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
6. Belum optimalnya pengelola aset;
7. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
8. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

## BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TERNATE

### IV.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2014, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.888.125.300,00 atau 12,30% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 9 program dengan 82 kegiatan. Tabel 7 di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan.

**Tabel IV.1. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2015**

NO	URUSAN	Anggaran	Belanja Langsung
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>		
1	Bidang Pendidikan	48.888.125.300,00	47.498.954.827,00
2	Bidang Kesehatan	19.432.170.069,00	18.991.717.831,44
3	Bidang Pekerjaan Umum	88.040.189.178,00	84.243.227.061,00
4	Bidang Perumahan	2.832.677.788,00	2.648.596.450,00
5	Bidang Penataan Ruang	7.789.114.646,00	7.558.376.530,00
6	Bidang Perencanaan Pembangunan	8.517.260.911,00	8.182.069.635,00
7	Bidang Perhubungan & Kominfo	8.829.328.167,00	8.093.255.064,00
8	Bidang Lingkungan Hidup	16.326.310.394,00	15.849.619.456,00
9	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	1.884.046.250,00	1.765.233.274,00
10	Bidang Pemberdayaan Perempuan	1.161.110.740,00	1.128.239.457,00
11	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2.620.961.720,00	2.242.660.752,00
12	Bidang Sosial dan Tenaga Kerja	4.316.672.080,00	4.099.735.376,00
13	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.804.307.622,00	1.715.697.592,00
14	Bidang Kebudayaan	2.884.113.475,00	2.668.648.627,00

15	Bidang Pemuda dan Olah Raga	4.773.336.521,00	4.183.739.886,00
16	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	10.121.414.360,00	9.936.439.673,00
17	Bidang Pemerintahan Umum	116.330.348.902,00	104.392.581.475,00
18	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.878.557.143,00	12.596.337.426,00
19	Bidang Kearsipan	1.835.768.118,00	1.683.780.963,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>361.265.813.384,00</b>	<b>339.478.911.355,44</b>
<b>B</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>		
1	Bidang Pertanian	8.584.014.252,00	8.298.855.226,00
2	Bidang Kehutanan	1.855.146.627,00	1.877.307.680,00
3	Bidang Pariwisata	1.538.475.000,00	1.436.440.000,00
4	Bidang Kelautan dan Perikanan	10.359.115.705,00	10.264.086.885,00
5	Bidang Perdagangan		-
a	Dinas Pasar	4.773.184.330,00	4.374.680.000,00
b	Dinas Perindag	6.946.675.600,00	5.647.401.600,00
6	Bidang Perindustrian		
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.182.822.490,00	2.130.823.202,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>36.239.434.004,00</b>	<b>34.029.594.593,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>397.505.247.388,00</b>	<b>373.508.505.948,44</b>

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU, dan rehabilitasi taman.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2015.

#### IV.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai

instrumen kendali;

3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD; dan
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **V.1. ENTITAS PELAPORAN**

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 adalah Pemerintah Kota Ternate. Selain itu Pemerintah Kota Ternate memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

#### **V.2. BASIS AKUNTANSI**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate tahun Anggaran 2015 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan

#### **V.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi adalah:

##### **1. Pendapatan**

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kota Ternate yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Ternate untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di



samping itu ada kalanya Pemerintah Kota Ternate menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Kota Ternate dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi SKPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:

- i. pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi);
- ii. perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk Pemerintah Daerah;
- iii. hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga internasional;
- iv. penghapusan utang;
- v. sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat;
- vi. dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.

Pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut:

- i. Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada.
- ii. Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/refundable). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti "pendapatan yang diterima di

muka” harus dicatat pada saat kas diterima.

#### Sentralisasi Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain

- b. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Ternate. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:
- i. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD;
  - ii. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

## 2. **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- i. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah;

- ii. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- iii. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

### 3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja **operasi** antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
  - (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - (3) bertambah volume, dan/atau
  - (4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

#### **4. Transfer**

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

#### **5. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

#### **6. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset non lancar yaitu:

##### **a. Aset Lancar**

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi

jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima permil).
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen)

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima permil)
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Untuk Piutang dari Dana Bagi Hasil tidak dilakukan penyisihan, karena pencatatan piutang berdasarkan SK Gubernur dan pada tahun berikutnya piutang tersebut pasti dibayarkan berdasarkan SK yang sudah terbit.

Persediaan mencakup (1) barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, (2) barang dan jasa yang akan diserahkan/dijual ke Masyarakat/Pihak lain.

b. Aset Non lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Ternate atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi:

- investasi jangka panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2015 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;

(ii) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi yang tidak dimaksudkan dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari:
  - a. Tanah;
  - b. Peralatan dan mesin;
  - c. Gedung dan bangunan;
  - d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
  - e. Aset tetap lainnya; dan
  - f. Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Menurut Lampiran, tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 ke atas.
- b. Aset tetap lainnya seperti bang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aset tetap lainnya tanpa batasan nilai tertentu.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Sedangkan pengeluaran setelah perolehan awal untuk aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud di atas diperlakukan sebagai berikut:

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya. Penyusutan masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 030/Kep.452 – DPKD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

- Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang



melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kota Ternate yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Ternate.

## 7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Ternate. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. **Kewajiban Jangka Pendek**  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*), Utang Bunga (*Accrued Interest*), Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.  
Utang bunga atas utang Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah Kota Ternate dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.  
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- b. **Kewajiban Jangka Panjang**  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Saat ini Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.  
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.  
Kewajiban Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- c. **Kewajiban Kontijensi**  
Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya

atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kota Ternate, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

**8. Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Ternate, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Ternate.

## BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2015. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015.

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LRA

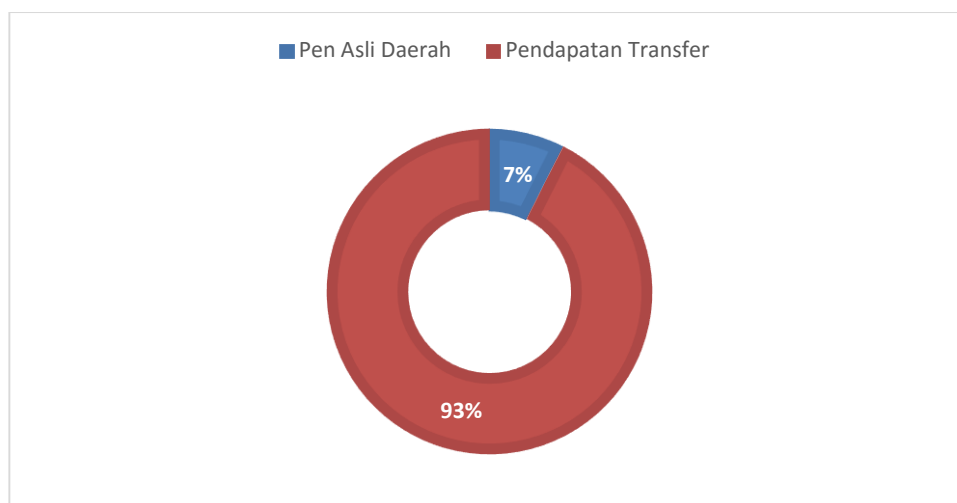
#### VI.1. PENDAPATAN –LRA

Pada Tahun Anggaran 2015 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp828.153.848.594,00 dan direalisasikan sebesar Rp817.617.739.008,08 atau 98,73% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2015 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015		Realisasi 2014
		(Rp.)	Rp	%	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	64.658.500.000,00	60.927.816.606,08	94,27	57.765.211.341,38
2	Pendapatan Transfer	763.495.348.594,00	756.638.994.464,00	99,10	715.145.849.038,00
3	Lain-Lain Pendapatan	-	50.927.938,00		51.050.100,00
Jumlah		<b>828.153.848.594,00</b>	<b>817.617.739.008,08</b>	98,73	<b>772.962.110.479,94</b>

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak dapat mencapai target, ada kekurangan target sebesar Rp3.370.683.393,92 (5,77%). Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2014, maka realisasi Tahun Anggaran 2015 lebih tinggi 5,48 % atau Rp3.162.605.264,14.

**Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015**



Berdasarkan grafik di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota Ternate masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Transfer mencapai 93% dari total penerimaan Pendapatan Daerah.

#### **VI.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2015 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015		Realisasi 2014
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	Pajak Daerah	31.700.500.000,00	34.563.610.582,00	109,0	31.160.603.565,00
2	Retribusi Daerah	20.961.000.000,00	15.069.299.386,00	71,94	14.789.487.140,50
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	850.000.000,00	100.231.200,00	11,79	765.132.728,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	11.147.000.000,00	11.194.675.438,08	100,67	11.049.987.908,44
	<b>Jumlah</b>	<b>64.658.500.000,00</b>	<b>60.927.816.606,08</b>	<b>94,23</b>	<b>57.765.211.341,94</b>

Berdasarkan rincian PAD di atas terlihat bahwa Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah yang melampaui target, namun secara keseluruhan Target PAD tidak dapat melampaui target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2014, maka terjadi peningkatan sebesar Rp3.162.605.264,14 atau 5,48%. Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan Pajak Daerah dengan kontribusi sebesar 56,70%.

### VI.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

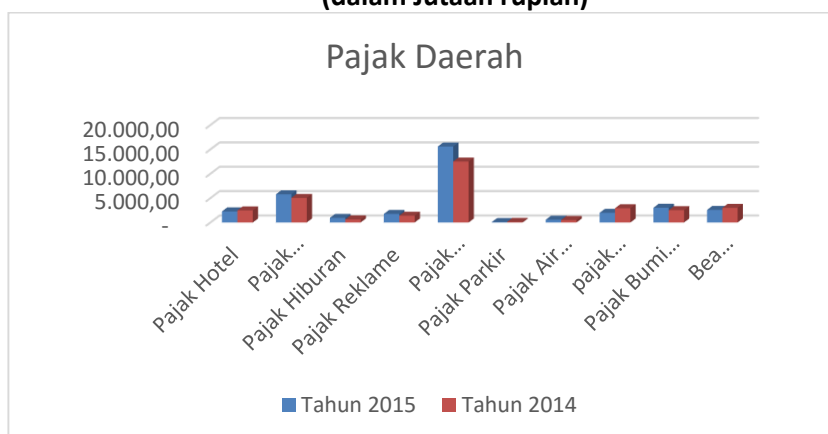
Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2015 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015		Realisasi 2014
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	Pajak Hotel	2.150.000.000,00	2.265.325.907,00	105,36	2.485.877.645,00
2	Pajak Restoran	4.550.000.000,00	5.780.979.996,00	127,05	5.043.419.820,00
3	Pajak Hiburan	775.500.000,00	944.296.091,00	121,77	628.290.555,00
4	Pajak Reklame	1.425.000.000,00	1.767.014.333,00	124,00	1.394.439.560,00
5	Pajak Penerangan Jalan	14.700.000.000,00	15.580.127.492,00	105,99	12.512.225.569,00
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	94.589.468,00	63,06	125.521.722,00
7	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	559.956.532,00	101,81	506.100.502,00
8	pajak mineral bukan logam	1.500.000.000,00	1.975.107.812,00	131,67	2.932.744.970,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	3.000.000.000,00	3.020.765.101,00	100,69	2.527.233.422,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.900.000.000,00	2.575.447.850,00	88,81	3.004.749.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>31.700.500.000,00</b>	<b>34.563.610.582,00</b>	<b>109,03</b>	<b>31.160.603.565,00</b>

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa tidak seluruh akun Pajak melampaui target penerimaan yang ditetapkan, dengan pelampauan target tertinggi pada realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam sebesar 31,67% atau melebihi target sebesar Rp475.107.812,00. Apabila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi realisasi penerimaan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2015 adalah pada realisasi Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar Rp15.580.127.492,00 atau sebesar 45,08% dari total realisasi Pajak Daerah.

Pada Tahun 2014, Pemerintah Kota Ternate menerima pelimpahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sector Perkotaan dan Pedesaan sehingga menambah kontribusi pada kenaikan realisasi pendapatan pajak daerah.

**Grafik VI.2. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2014 – 2015  
(dalam Jutaan rupiah)**



Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2015 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2014.

### VI.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2015 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi Tahun 2015		Realisasi 2014 (Rp)
			Rp	%	
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>5.860.000.000,00</b>	<b>10.013.195.050,00</b>	<b>170,87</b>	<b>9.068.335.250,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-		10.580.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.450.000.000,00	1.846.825.500,00	<b>75,8</b>	1.643.165.000,00
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-	-		9.400.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	2.125.000.000,00	1.233.500.000,00	<b>58,05</b>	1.263.700.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	-	6.124.669.550,00		5.444.565.250,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-		75.945.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.050.000.000,00	788.100.000,00	<b>75,06</b>	620.980.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	85.000.000,00	20.100.000,00	<b>23,65</b>	20.100.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	150.000.000,00	-		-
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>10.116.000.000,00</b>	<b>1.763.248.000,00</b>	<b>17,43</b>	<b>1.345.810.000,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	963.000.000,00	417.946.000,00	<b>43,40</b>	399.865.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	7.130.000.000,00	-		-
3	Retribusi Tempat Pelelangan	30.000.000,00	-		-
4	Retribusi Terminal	600.000.000,00	305.800.000,00	<b>50,97</b>	315.600.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	600.000.000,00	381.461.000,00	<b>63,58</b>	359.500.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	98.335.000,00	<b>98,34</b>	100.635.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	325.000.000,00	193.530.000,00	<b>59,55</b>	150.110.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	368.000.000,00	366.176.000,00	<b>99,50</b>	152.700.000,00
<b>III</b>	<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>	<b>4.985.000.000,00</b>	<b>3.292.856.336,00</b>	<b>66,06</b>	<b>4.375.341.891,00</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.250.000.000,00	2.261.296.023,00	<b>69,58</b>	3.055.522.616,00
2	Retribusi Izin Gangguan	1.450.000.000,00	926.555.313,00	<b>63,90</b>	649.277.800,00
3	Retribusi Izin Trayek	90.000.000,00	16.965.000,00	<b>18,85</b>	18.045.000,00
4	Retribusi Izin Perikanan	120.000.000,00	88.040.000,00	<b>73,37</b>	169.540.200,00

No	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi Tahun 2015		Realisasi 2014 (Rp)
5	Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP/TDP)	-	-		326.756.275,00
6	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	75.000.000,00	-		-
7	Sumbangan Pihak Ketiga (Kontraktor)	-	-		3.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.961.000.000,00</b>	<b>15.069.299.386,00</b>	<b>71,89</b>	<b>14.789.487.141,00</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 24 jenis retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2015, tidak seluruhnya memiliki realisasi. Dari realisasi yang ada total Retribusi daerah hanya dapat tercapai 71,89% dari target yang telah ditentukan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga, untuk tahun anggaran 2015 penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015		Anggaran 2014
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	-	100.231.200,00	-	765.132.728,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	850.000.000,00	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>100.231.200,00</b>	<b>11,79</b>	<b>765.132.728,00</b>

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa realisasi yang mencapai target diperoleh dari penerimaan pendapatan deviden yang berasal dari PT. BPR Syariah Bahari Berkesan.

### VI.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun anggaran 2015 pos ini terdiri dari:

NO	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015		Realisasi 2014
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	391.500.000,00	0	567.684.100,00
2	Penerimaan Jasa Giro	-	415.428.801,10	0	427.182.683,59
3	Penerimaan Bunga Deposito	-	2.934.828.765,81	0	1.961.579.451,57
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	12.663.714,00	0	70.502.500,00
5	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	11.147.000.000,00	4.334.731.200,47	38,89	8.023.039.173,28



NO	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015		Realisasi 2014
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA		3.081.211.455,70		
7	Pendapatan Yang ditanggguhkan Tahun lalu		24.311.500,00	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>11.147.000.000,00</b>	<b>11.194.675.438,08</b>	100,43	<b>11.049.987.908,44</b>

Rincian penerimaan di atas memperlihatkan bahwa pada Tahun Anggaran 2015, realisasi penerimaan terbesar untuk Tahun Anggaran 2015 adalah Lain-lain PAD yang sah dan juga merupakan kontribusi terbesar untuk Lain-lain PAD yang sah.

Pada Tahun Anggaran 2015 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu (1) Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

### VI.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Propinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2015 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Ternate melalui Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015		Anggaran 2014
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	639.297.411.412,00	633.647.253.093,00	99,12	634.404.598.126,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	99.168.857.000,00	97.254.431.000,00	98,07	64.309.914.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	25.029.080.182,00	25.737.310.371,00	102,83	16.431.336.912,00
<b>JUMLAH</b>		<b>763.495.348.594,00</b>	<b>756.638.994.464,00</b>	99,10	<b>715.145.849.038,00</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2015 realisasi Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar 99,10% dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2014, maka terjadi peningkatan sebesar Rp41.493.145.426,00 atau 5,80%.

#### VI.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk tahun anggaran 2015 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
<b>1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak - LRA</b>	<b>26.340.606.412,00</b>	<b>15.938.728.800,00</b>	60,51	22.882.946.702,00
	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	26.340.606.412,00	15.938.728.800,00		
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA		7.779.726.000,00		
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA		1.714.274.000,00		
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA		857.137.000,00		
	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 ; Pasal 29 ; dan PPh Pasal 21 - LRA		5.587.591.800,00		
<b>2</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA</b>	<b>10.464.518.000,00</b>	<b>15.216.237.293,00</b>	145,41	15.353.542.424,00
	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA	0,00	39.882.000,00		
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	10.453.026.000,00	641.788.837,00	6,14	
	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	0,00	10.546.292.523,00		
	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	0,00	183.018.600,00		
	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	0,00	520.245.433,00		
	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	0,00	3.276.965.500,00		
	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	11.492.000,00	8.044.400,00	70,00	
<b>3</b>	<b>Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA</b>	<b>547.124.097.000,00</b>	<b>547.124.097.000,00</b>	100,00	536.443.879.000,00
<b>4</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA</b>	<b>55.368.190.000,00</b>	<b>55.368.190.000,00</b>	100,00	59.724.230.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>639.297.411.412,00</b>	<b>633.647.253.093,00</b>	99,12	<b>634.404.598.126,00</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar 99,12%. Realisasi tertinggi dihasilkan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA yaitu sebesar Rp15.216.237.293,00 atau mencapai 145,41%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2014, maka terjadi penurunan sebesar Rp757.345.033,00 atau 1,19%.

### VI.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Akun Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2014
		2015	2015	%	
1	<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>99.168.857.000,00</b>	<b>97.254.431.000,00</b>	98,07	63.424.586.000,00
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	78.104.765.000,00	78.104.765.000,00	100,00	
	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.640.000.000,00	0,00	0	
	Dana Insentif Daerah - LRA	18.424.092.000,00	18.424.092.000,00	100,00	
	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	0,00	725.574.000,00		
	<b>JUMLAH</b>	<b>99.168.857.000,00</b>	<b>97.254.431.000,00</b>	<b>98,07</b>	<b>63.424.586.000,00</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk pada Tahun 2015 seluruhnya berasal dari komponen Dana Penyesuaian dan apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp33.829.845.000,00 atau 53,34%.

### VI.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Akun Transfer Pemerintah Provinsi merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2015 sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015		Realisasi 2014
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	PKB	4.000.000.000,00	7.138.061.293,00	178,45	4.122.418.616,00
2	BBNKB	5.000.000.000,00	890.722.428,00	17,81	7.954.337.071,00
3	PBBKB	10.500.000.000,00	6.824.692.392,00	65,00	4.249.324.473,00
4	P3ABT	850.000.000,00	2.195.111.648,00	258,25	105.256.752,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	4.296.228.182,00	8.688.722.610,00	202,24	0
6	Bagi Hasil Lainnya	382.852.000,00	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>25.029.080.182,00</b>	<b>25.737.310.371,00</b>	<b>102,83</b>	<b>16.431.336.912,00</b>

Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk akun ini sebesar Rp25.737.310.371,00 (102,83%) dapat mencapai target penerimaan dari yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2014, maka terjadi peningkatan sebesar Rp9.305.973.459,00 atau 56,64%.

#### VI.1.2.4. Bantuan Keuangan

Akun Bantuan Keuangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2015 penerimaan Bantuan Keuangan tidak dianggarkan sehingga untuk tahun 2015 penerimaan dari akun Bantuan Keuangan nihil.

#### VI.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Ternate tidak menganggarkan penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah, adapun realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp50.927.938,00 seluruhnya berasal dari pendapatan yang disetor PT. Taspem.

### VI.2. BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2015 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp875.995.832.509,00 dan direalisasikan sebesar Rp831.370.455.459,44 atau 94,91%, sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp44.625.377.049,56 (5,19%). Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015		Realisasi 2014
			Rp	%	
1	Belanja Operasional	711.883.730.529,00	675.064.937.725,44	94,83	572.045.507.400,00
2	Belanja Modal	157.112.101.980,00	150.235.317.734,00	95,62	149.178.430.887,24
3	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	6.070.200.000,00	86,72	9.686.580.000,00
<b>JUMLAH</b>		875.995.832.509,00	831.370.455.459,44	94,91	730.910.518.287,24

Berdasarkan tabel realisasi di atas, terlihat bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Tak Terduga yaitu sebesar 86,72%.

#### VI.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Ternate yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015		Realisasi 2014
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	434.741.767.760,00	414.729.923.791,00	95,40	427.638.664.005,00
2	Belanja Barang dan Jasa	239.641.462.769,00	208.510.954.114,44	87,01	133.808.505.425,00
3	Belanja Hibah	32.100.000.000,00	45.610.450.100,00	142,09	5.300.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	5.400.500.000,00	5.400.500.000,00	100,00	5.298.337.970,00
5	Belanja Bantuan Keuangan	813.109.720,00	813.109.720,00	100,00	498.370.270,00
<b>JUMLAH</b>		711.883.730.529,00	675.064.937.725,44	94,71	572.045.507.400,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2015 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp675.064.937.725,44 (94,83%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 711.883.730.529,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp37.631.902.523,56 (5,29%). Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp572.045.507.400,00 maka terjadi peningkatan realisasi pengeluaran sebesar Rp102.206.320.605,44 (17,87%). Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2015:

1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp414.729.923.791,00 (95,55%) dengan sisa anggaran sebesar Rp19.336.408.969,00 (4,66%), realisasi ini terutama digunakan untuk:
  - a. Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja tidak langsung) sebesar Rp316.705.446.494,00, diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - b. Pembayaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja langsung) sebesar Rp98.024.477.297,00, diantaranya dalam bentuk honor panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.
2. Belanja Barang untuk Tahun Anggaran 2015 direalisasikan sebesar Rp208.510.954.114,44 atau 87,06% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp30.992.833.934,56 (14,86%). Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung, serta jaringan irigasi, biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD. Belanja Barang ini terdiri dari:
  - a. Belanja Barang dan Jasa, guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp192.906.817.031,00 dan direalisasikan sebesar Rp167.216.463.248,44 (86,68%). Termasuk dalam realisasi belanja ini adalah untuk pembayaran insentif guru sebesar Rp68.578.623.500,00 dalam

bentuk Belanja Jasa Pelayanan Pendidikan. Dalam belanja barang dan Jasa ini sebelumnya terdapat realisasi belanja barang yang diserahkan ke pihak ketiga sebesar Rp14.110.450.100,00, dimana belanja tersebut secara substansi merupakan belanja hibah sehingga di pindahkan/reklasifikasi ke realisasi belanja hibah hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari APBD.

- b. Belanja Pemeliharaan, belanja ini lebih diutamakan untuk mempertahankan kondisi aset tetap yang dimiliki agar sesuai dengan kondisi normal dan tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi untuk pengeluaran setelah perolehan awal. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp4.444.510.290,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.620.030.824,00 (81,45%). Belanja pemeliharaan ini diantaranya ditujukan untuk pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional dan jabatan, pemeliharaan rutin bangunan kantor, pemeliharaan rutin gedung sekolah, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, dan pemeliharaan rutin saluran drainase.
  - c. Belanja Perjalanan Dinas, belanja ini ditujukan untuk membiayai perjalanan Dinas ke luar daerah. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp42.290.135.448,00 dan direalisasikan sebesar Rp37.674.460.042,00 (89,09%).
3. Pos Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2015 dialokasikan sebesar Rp32.100.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp45.610.450.100,00 atau 142,09%. Realisasi belanja yang melebihi anggaran tersebut disebabkan karena adanya kewajiban konversi dari belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat/ pihak ke tiga sesuai point 2.a di atas sebesar Rp14.110.450.100,00 ke dalam belanja Hibah. Rincian atas belanja Hibah sebesar Rp46.610.450.100,00 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a	Belanja Hibah	31.500.000.000,00
b	Belanja Yang diserahkan ke masyarakat/pihak ke tiga	14.110.450.100,00
	Total	45.610.450.000,00

a. Rincian Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PKK Kota Ternate	700.000.000,00	700.000.000,00	100
2	Dharma Wanita	500.000.000,00	500.000.000,00	100
3	Pramuka	700.000.000,00	700.000.000,00	100
4	KORPRI	500.000.000,00	500.000.000,00	100
5	KONI Kota Ternate	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100
6	PMI	300.000.000,00	300.000.000,00	100
7	KNPI	200.000.000,00	200.000.000,00	100
8	Komisi Penanggulangan AIDS	250.000.000,00	250.000.000,00	100
9	Badan Amil Zakat	600.000.000,00	600.000.000,00	100
10	KPU	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	100
11	PANWAS	3.950.000.000,00	3.950.000.000,00	100
12	Mui	150.000.000,00	0,00	0
13	Kejari	100.000.000,00	0,00	0
14	Polres Ternate	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100

15	TNI	500.000.000,00	500.000.000,00	100
15	PLN	350.000.000,00	0,00	0
		32.100.000.000,00	31.500.000.000,00	99.84

b. Rincian Belanja Barang yang diserahkan ke masyarakat/ pihak ke tiga.

No	Nama SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum	5.559.276.100,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	45.000.000,00
3	Dinas Pemuda dan Olah Raga	39.915.000,00
4	Sekretariat Daerah	1.621.500.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.147.924.000,00
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	597.120.000,00
7	Badan Pengendalian Kependudukan dan KB	99.715.000,00
	Jumlah	14.110.450.100,00

- Pos Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2015 dialokasikan sebesar Rp5.400.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.400.500.000,00 atau 100%. Realisasi pos belanja ini diperuntukkan seluruhnya untuk Organisasi Sosial kemasyarakatan.
- Pos Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2015 dialokasikan sebesar Rp813.109.720,00 dan direalisasikan sebesar Rp813.109.720,00 atau 100 % Realisasi pos belanja ini diperuntukkan seluruhnya untuk Bantuan kepada Partai Politik dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1	DPD Golkar	106.917.440,00	106.917.440,00
2	DPD Demokrat	84.435.330,00	84.435.330,00
3	DPD PAN	49.567.430,00	49.567.430,00
4	PDC PDI-P	100.995.560,00	100.995.560,00
5	DPC Hanura	43.127.790,00	43.127.790,00
6	DPD PKS	49.567.430,00	49.567.430,00
7	DPC PPP	84.038.920,00	84.038.920,00
8	DPC PBB	43.516.110,00	43.516.110,00
9	DPD Nasdem	82.760.700,00	82.760.700,00
10	DPC Gerindra	62.325.360,00	62.325.360,00
11	DPC PKPI	49.397.540,00	49.397.540,00
12	DPC PKB	56.460.110,00	56.460.110,00
	<b>Total</b>	<b>813.109.720,00</b>	<b>813.109.720,00</b>

## VI.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu

periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Ternate adalah pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015		Realisasi 2014 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Tanah	8.860.550.000,00	8.654.567.750,00	97,68	11.608.587.950,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.477.447.931,00	26.201.398.536,00	95,36	22.126.411.941,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.998.970.768,00	62.770.011.284,00	93,69	51.118.080.529,76
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.457.011.683,00	49.332.257.968,00	97,77	63.034.981.241,48
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.318.121.598,00	3.277.082.196,00	98,76	1.290.369.225,00
	<b>Jumlah</b>	<b>157.112.101.980,00</b>	<b>150.235.317.734,00</b>	<b>95,62</b>	<b>149.178.430.887,24</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp157.112.101.980,00 dan direalisasikan sebesar Rp150.235.317.734,00 atau 95,62%. Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama tahun anggaran 2015.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2015.



Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015, hal ini disebabkan karena tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening Belanja Modal namun setelah dihitung per jenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak



memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, maka barang yang diperoleh akan di kelompokkan dalam barang inventaris.

Rincian masing-masing belanja modal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah :  
Dari belanja modal tanah sebesar Rp8.654.567.750,00 tersebut terdapat belanja tanah yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp3.847.075.000,00 karena tanah tersebut akan di serahkan ke masyarakat/pihak ketiga, dapat dilihat pada *Lampiran 1*.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :  
Dari belanja Modal peralatan mesin sebesar Rp26.201.398.536,00 tersebut terdapat belanja peralatan mesin yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp6.220.881.145,00 dikarenakan:
  - a. Terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak masuk dalam batas minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp4.318.598.074,00
  - b. Terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak masuk dalam aset karena di Hibahkan sebesar Rp1.902.283.071,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :  
Dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp62.770.011.284,00 tersebut terdapat belanja modal gedung dan bangunan yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp5.650.856.000,00 karena dihibahkan/diberikan kepada pihak ketiga.
4. Belanja Modal jalan irigasi dan jaringan :  
Belanja modal Jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp49.332.257.968,00 tersebut seluruhnya menjadi aset jalan irigasi dan jaringan.
5. Belanja Modal aset tetap lainnya :  
Dari belanja Modal aset tetap lainnya sebesar Rp3.277.082.196,00 tersebut terdapat belanja aset tetap lainnya yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp878.709.961,00 dikarenakan:
  - a. Terdapat belanja modal aset tetap lainnya yang tidak masuk dalam batas minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp1.815.000,00
  - b. Terdapat belanja modal aset tetap lainnya yang tidak masuk dalam aset karena dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp476.894.961,00.

### **VI.2.3. Belanja Tak Terduga**

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota

Ternate. Pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.070.200.000,00 (86,72%).

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015		Realisasi 2014
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	6.070.200.000,00	86,72	9.686.580.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>6.070.200.000,00</b>	<b>86,72</b>	<b>9.686.580.000,00</b>

### VI.3. TRANSFER

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Ternate ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kota Ternate tidak mengalokasikan pengeluaran Transfer.

### VI.4. SURPLUS/DEFISIT

Dalam APBD Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Ternate menganggarkan defisit anggaran sebesar (Rp47.841.983.915,00), namun dalam realisasinya terjadi defisit sebesar (Rp13.752.716.452,36.)

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015		Realisasi 2014
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	Surplus/Defisit	(47.841.983.915,00)	(13.752.716.452,36)	28,75	42.051.592.192,70
	<b>J u m l a h</b>	<b>(47.841.983.915,00)</b>	<b>(13.752.716.452,36)</b>	<b>28,75</b>	<b>42.051.592.192,70</b>

### VI.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Ternate terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### VI.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Pemerintah Kota Ternate menganggarkan penerimaan Pembiayaan sebesar Rp54.191.983.915,00 dan terealisasi sebesar Rp Rp18.227.365.805,70

atau 33,63%.

Penerimaan Pembiayaan Kota Ternate untuk Tahun Anggaran 2015 terdiri dari Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp18.227.365.805,70. SILPA tahun lalu sebesar Rp18.401.465.805,70 tidak bisa digunakan seluruhnya karena terdapat koreksi SILPA sebesar Rp174.100.000,00 yang merupakan kas yang dibuat barang bukti di Kejari Ternate dan telah dipindah ke akun aset lainnya—kas yang dibatasi penggunaannya.

#### VI.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Ternate menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp6.350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.850.000.000,00 atau 92,13%.

#### VI.5.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2015.

No	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015		Realisasi 2014 (Rp)
			Rp	%	
1	SILPA/SIKPA	0.00	(1.375.350.645,66)	0	18.401.465.805.70
	<b>J u m l a h</b>	<b>0.00</b>	<b>(1.375.350.645,66)</b>	<b>0</b>	<b>18.401.465.805.70</b>

SIKPA untuk Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar (1.375.350.645,66).

### SALDO ANGGARAN LEBIH

#### VI.6. KOMPONEN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2015 dibandingkan dengan tahun2014.

##### VI.6.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2015 adalah sebesar Rp18.401.465.805,70.

##### VI.6.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2014 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yaitu sebesar Rp18.227.365.805,70.

#### **VI.6.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2015 menghasilkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp1.375.350.645,66, yang berasal dari:

- a. Pelampauan realisasi belanja daerah (defisit) sebesar (Rp13.752.716.452,36),
- b. Sisa pelaksanaan belanja daerah sebesar Rp12.377.365.805,70

#### **VI.6.4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya**

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp174.100.000,00 merupakan kas yang disita oleh Kejari Ternate sebagai barang bukti pada TA 2014, dimana tahun 2014 diakui sebagai bagian dari SiLPA. Dan untuk tahun 2015 telah dipindahkan ke akun aset lainnya-kas yang dibatasi penggunaannya.

#### **VI.6.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar (Rp1.375.350.645,66).

## **LAPORAN OPERASIONAL**

### **VI.7. PENDAPATAN-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pada Tahun 2015 Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp838.641.120.938,19.

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2014	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	Pendapatan Daerah Asli	87.900.644.210,16			

2	Pendapatan Transfer	750.689.548.790,00			
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	50.927.938,00			
	<b>Jumlah</b>	<b>838.641.120.938,16</b>			

### VI.7.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2015 direalisasikan sebesar Rp87.900.644.210,16 .

Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	35.834.552.508,00			
2	Pendapatan Retribusi Daerah	15.131.124.257,00			
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100.231.200,00			
4	Lain-lain PAD yang Sah	36.891.166.745,16			
	<b>Jumlah</b>	<b>87.900.644.210,16</b>		-	#DIV/0!

#### VI.7.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2015 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2015
1	Hotel - LO	2.244.815.507,00
2	Restoran - LO	5.749.692.610,00
3	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	944.296.091,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	1.282.968.057,00
5	Pajak Reklame Kain - LO	538.881.750,00
6	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	24.985.500,00
7	Pajak Reklame Selebaran - LO	12.187.500,00
8	Pajak Reklame Berjalan - LO	10.750.000,00
9	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	15.580.127.492,00
10	Pajak Parkir - LO	94.589.468,00
11	Pajak Air Tanah - LO	645.723.901,00

12	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	1.975.107.812,00
13	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	4.154.978.970,00
14	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	2.575.447.850,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>35.834.552.508,00</b>

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas Pajak 2015 Kota Ternate dengan realisasi sebesar Rp35.834.552.508,00, dengan kontribusi penerimaan terbesar pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2015.

No	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Total
1	Hotel - LO	2.244.815.507,00		2.244.815.507,00
2	Restoran - LO	5.749.692.610,00		5.749.692.610,00
3	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	944.296.091,00		944.296.091,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	1.088.548.132,00	194.419.925,00	1.282.968.057,00
5	Pajak Reklame Kain - LO	538.881.750,00		538.881.750,00
6	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	24.985.500,00		24.985.500,00
7	Pajak Reklame Selebaran - LO	12.187.500,00		12.187.500,00
8	Pajak Reklame Berjalan - LO	10.750.000,00		10.750.000,00
9	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	15.580.127.492,00		15.580.127.492,00
10	Pajak Parkir - LO	94.589.468,00		94.589.468,00
11	Pajak Air Tanah - LO	559.527.801,00	86.196.100,00	645.723.901,00
12	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	1.975.107.812,00		1.975.107.812,00
13	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	2.686.116.062,00	1.468.862.908,00	4.154.978.970,00
14	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	2.575.447.850,00		2.575.447.850,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>34.085.073.575,00</b>	<b>1.749.478.933,00</b>	<b>35.834.552.508,00</b>

#### VI.7.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontra prestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2015
1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	-
2	Balai Pengobatan - LO	-
3	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO	1.846.825.500,00
4	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	1.233.500.000,00

5	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO	1.629.673.000,00
6	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO	4.500.390.921,00
7	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO	788.100.000,00
8	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	20.100.000,00
9	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	202.996.000,00
10	Ruangan -LO	64.620.000,00
11	Kendaraan Bermotor - LO	150.330.000,00
12	Tempat Kegiatan Usaha - LO	305.800.000,00
13	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	372.361.000,00
14	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LO	98.335.000,00
15	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	202.630.000,00
16	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	366.176.000,00
17	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	2.261.296.023,00
18	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO	925.475.313,00
19	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO	1.080.000,00
20	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	16.965.000,00
21	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO	88.040.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.074.693.757,00</b>

Berdasarkan rincian Pendapatan Retribusi Daerah di atas terlihat bahwa Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2015 sebesar Rp15.074.693.757,00.

#### VI.7.1.2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp100.231.200,00 yang merupakan pembagian deviden dari PT. BPRS Bahari Berkesan.

#### VI.7. 1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah yang diterima selama tahun 2015 adalah sebesar Rp36.891.166.745,16.

No	Uraian	Realisasi 2015
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	444.000.000,00
2	Jasa Giro Kas Daerah - LO	415.428.801,10
3	Pendapatan Bunga Deposito - LO	2.934.828.765,81
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan BLH - LO	12.663.714,00

5	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	29.986.852.187,25
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	3.097.393.277,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36.891.166.745,16</b>

## VI.7. 2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal adanya kurang salur. Pendapatan Transfer terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2014	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<b>633.647.253.093,00</b>	634.404.598.126,00	(757.345.033,00)	-0,12
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- lainnya	97.254.431.000,00	64.309.914.000,00	32.944.517.000,00	51,23
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - lainnya	19.787.864.697,00	16.431.336.912,00	3.356.527.785,00	20,43
	<b>JUMLAH</b>	<b>750.689.548.790,00</b>	<b>715.145.849.038,00</b>	<b>35.543.699.752,00</b>	<b>4,97</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2015 secara total mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp35.543699.752,00 atau 4,97%.

### VI.7. 2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Ternate pada tahun 2015 adalah sebesar Rp633.647.253.093,00.

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2014	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	15.938.728.800,00	22.882.946.702,00	(6.944.217.902,00)	30,35
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	15.216.237.293,00	15.353.542.424,00	(137.305.131,00)	-0,89
3	Dana Alokasi Umum	547.124.097.000,00	536.443.879.000,00	10.680.218.000,00	
3	Dana Alokasi Khusus	55.368.190.000,00	59.724.230.000,00	(4.356.040.000,00)	-7,29
	<b>JUMLAH</b>	<b>633.647.253.093,00</b>	<b>634.404.598.126,00</b>	<b>(757.345.033,00)</b>	<b>-0,12</b>

Untuk Tahun 2015, Pendapatan Dana Perimbangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di



Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

#### VI.7.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2015 adalah sebesar Rp15.938.728.800,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2014 sebesar Rp22.882.946.702,00 maka nilainya lebih kecil.

No	Uraian	Realisasi 2015
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	7.779.726.000,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO	1.714.274.000,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	857.137.000,00
4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	5.587.591.800,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.938.728.800,00</b>

#### VI.7.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2015 sebesar Rp15.216.2237.293,00 lebih kecil bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp15.353.542.424,00 atau turun sebesar Rp137.305.131,00 (0,89%). Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2015
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	39.882.000,00
2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	641.788.837,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	10.546.292.523,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	183.018.600,00
5	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	520.245.433,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	3.276.965.500,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	8.044.400,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.216.237.293,00</b>

#### VI.7. 2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tahun 2015 adalah sebesar Rp547.124.097.000,00, lebih besar bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum yang diterima pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp536.443.879.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp10.680.218.000,00 (1,99%).

#### VI.7.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2015 adalah sebesar Rp55.368.190.000,00, lebih kecil bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus yang diberikan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp59.724.230.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.356.040.000,00 (7,29%).

### VI.7. 2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Untuk Tahun 2015 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya adalah sebesar Rp97.254.431.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Dana Penyesuaian.

#### VI.7. 2.2.1. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp97.254.431.000,00 lebih besar bila dibandingkan dengan dana penyesuaian yang diberikan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp63.424.586.000,00 atau naik sebesar Rp33.829.845.000,00 (53,34%). Realisasi Dana Penyesuaian terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2015
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	78.104.765.000,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00
3	Dana Insentif Daerah - LRA	18.424.092.000,00
4	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	725.574.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>97.254.431.000,00</b>

Untuk Tahun 2015, Pendapatan Dana Penyesuaian seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

### VI.7. 2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah untuk Tahun 2015 seluruhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp19.787.864.697,00.

#### VI.7. 2.3.1. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2015 adalah sebesar Rp19.787.864.697,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2015
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	14.493.848.382,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	5.294.016.315,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>19.787.864.697,00</b>

### VI.7.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2015

adalah sebesar Rp50.927.938,00 yang merupakan setoran dari PT. Taspen.

## VI.8. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Selama Tahun 2015 Beban Pemerintah Kota Ternate adalah sebesar Rp786.912.492.755,00.

### VI.8.1. BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp414.729.923.791,00. Rincian beban pegawai adalah sebagai berikut:

JENIS BEBAN	JUMLAH (Rp)
Gaji Pegawai	316.127.801.448,00
Jaminan Kecelakaan & kematian	577.645.046,00
Tambahan Penghasilan	24.522.977.137,00
Tunjangan Guru	68.578.623.500,00
Tunjangan operasional Walikota & Kepala SKPD	2.034.422.660,00
Insentif Pajak dan retribusi	2.237.150.000,00
Beban Lembur	651.304.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>414.729.923.791,00</b>

### VI.8.2. BEBAN PERSEDIAAN

Beban persediaan Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp38.125.195.137,00. Dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BEBAN	JUMLAH (Rp)
Alat tulis, materai dan dokumen lain	10.086.991.224,00
Pembersih , BBM dan hadiah	2.624.364.476,00
Bibit , Obat2an dan bahan baku	23.051.248.157,00
Perlengkapan Olah raga, pertukangan dll.	2.362.591.280,00

<b>TOTAL</b>	<b>38.125.195.137,00</b>
--------------	--------------------------

### VI.8.3. BEBAN JASA

Beban Jasa Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp156.900.422.548,11, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BEBAN	JUMLAH (Rp)
Beban Jasa Kantor	22.217.615.540,37
Beban Jasa Asuransi	1.593.684.775,00
Beban Perawatan kendaraan	31.594.255.344,00
Beban cetak penggandaan	7.840.215.753,00
Beban sewa	4.081.029.133,30
Beban makan minum	18.495.594.889,00
Beban pakaian dinas	1.673.548.518,00
Beban jasa Konsultansi	1.913.162.050,00
Beban beasiswa & kursus	2.943.409.050,00
Beban honorarium	62.246.129.156,00
Beban dari Dana FKTP	2.301.778.339,44
<b>Total</b>	<b>156.900.422.548,11</b>

### VI.8.4. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp3.551.390.824,00. Dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BEBAN	JUMLAH (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	99.600.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	220.530.500,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.376.771.774,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	455.660.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	223.169.400,00
Beban Pemeliharaan Jaringan LAN / WAN / Internet	93.600.000,00
Beban pemeliharaan perlengkapan kantor	52.059.150,00
<b>Total</b>	<b>3.551.390.824,00</b>

### VI.8.5. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp37.674.460.042,00. Dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BEBAN	JUMLAH (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.899.882.404,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.822.566.938,00

Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-
Beban Transportasi dan Akomodasi	1.952.010.700,00
<b>Total</b>	<b>37.674.460.042,00</b>

### VI.8.6. BEBAN HIBAH

Beban hibah Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp46.074.918.131,49. Beban Hibah pada Tahun 2015 selain berasal dari belanja hibah juga berasal dari belanja barang atau belanja modal yang secara substansi diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga. Beban hibah tersebut terdiri dari:

a. Beban Hibah berupa uang yang ada di DPKAD:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PKK Kota Ternate	700.000.000,00	700.000.000,00	100
2	Dharma Wanita	500.000.000,00	500.000.000,00	100
3	Pramuka	700.000.000,00	700.000.000,00	100
4	KORPRI	500.000.000,00	500.000.000,00	100
5	KONI Kota Ternate	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100
6	PMI	300.000.000,00	300.000.000,00	100
7	KNPI	200.000.000,00	200.000.000,00	100
8	Komisi Penanggulangan AIDS	250.000.000,00	250.000.000,00	100
9	Badan Amil Zakat	600.000.000,00	600.000.000,00	100
10	KPU	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	100
11	PANWAS	3.950.000.000,00	3.950.000.000,00	100
12	MUI	150.000.000,00	0,00	0
13	Kejari	100.000.000,00	0,00	0
14	Polres Ternate	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100
15	TNI	500.000.000,00	500.000.000,00	100
15	PLN	350.000.000,00	0,00	0
		32.100.000.000,00	31.500.000.000,00	99.84

b. Beban barang diserahkan kepada masyarakat dan beban melekat pada pengeluaran SKPD dengan rinciannya sbb. :

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	5.559.276.100,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	45.000.000,00
3	Dinas Pemuda dan Olah Raga	39.915.000,00
4	Sekretariat Daerah	1.621.500.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.147.924.000,00
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	597.120.000,00
7	Badan Pengendalian Kependudukan dan KB	99.715.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.110.450.100,00</b>

c. Belanja dengan salah klasifikasi yang sebenarnya secara substansi belanja tersebut akan diserahkan kepada masyarakat dan melekat pada pengeluaran SKPD :

No	Uraian Belanja	SKPD	Klasifikasi Belanja di DPA	Nilai
1	Perencanaan, pengawasan dan pengadaan embung	Dinas Pertanian	Belanja barang-bahan/material	538.433.000.00
2	Pembuatan irigasi air tanah	Dinas	Belanja barang-	

		Pertanian	bahan/material	325.580.000,00
3	Pembuatan lantai jemur cengkeh	Dinas Pertanian	Belanja barang-bahan/material	53.500.000,00
4	Pengembangan tanaman hortikultura	Dinas Pertanian	Belanja barang-bahan/material	118.300.000,00
5	Pengembangan tanaman sukun	Dinas Pertanian	Belanja barang-bahan/material	25.625.000,00
6	Pengadaan bahan pagar Kofo	Dinas Pertanian	Belanja barang-bahan/material	46.800.000,00
7	Pengadaan bibit tanaman perkebunan	Dinas Pertanian	Belanja barang-bahan/material	15.868.000,00
8	Perencanaan, pengawasan dan pengadaan gedung sekolah swasta	Diknas	Belanja modal gedung dan bangunan	1.285.078.000,00
9	Pengadaan alat laboratorium yang diserahkan ke sekolah swasta	Diknas	Belanja modal peralatan dan mesin	1.193.345.370,99
10	Pengadaan meubelair yang akan diserahkan ke sekolah swasta	Diknas	Belanja modal peralatan dan mesin	327.047.700,00
11	Pengadaan buku yang akan diserahkan ke sekolah swasta	Diknas	Belanja modal aset tetap lainnya	476.894.960,50
	<b>JUMLAH</b>			<b>4.406.472.031,49</b>

Dari tabel beban dengan salah klasifikasi di atas ada sebagian beban yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat karena sesuatu hal sampai akhir tahun anggaran ternyata belum diserahkan dengan perincian sbb. :

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	127.300.000,00
2	Dinas PU	3.814.704.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.942.004.000,00</b>

Jadi nilai Beban Hibah pada tahun 2015 sebesar: (Rp31.500.000.000,00 + Rp14.110.450.100,00 + Rp4.406.472.031,49) - Rp3.942.004.000,00 = **Rp46.074.918.131,49**

#### VI.8.7. BEBAN BANTUAN SOSIAL

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp5.400.500.000,00. Beban Bantuan Sosial seluruhnya direalisasikan untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan dalam bentuk pengeluaran kas (uang).

### VI.8.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp82.978.961.270,00 yang terdiri dari penyusutan sebesar Rp82.873.802.335,00 dan amortisasi sebesar Rp105.158.935,00 rincian penyusutan dapat di lihat pada *Lampiran 2* dan rincian amortisasi dapat dilihat pada *Lampiran 3*.

### VI.8.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp663.611.291,00, terdiri dari:

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyisihan piutang pajak	495.284.881,00
2	Beban Penyisihan piutang retribusi	3.037.200,00
3.	Beban penyisihan piutang TPTGR	84.538.210,00
4	Beban Penyisihan Piutang	80.751.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>663.611.291,00</b>

Adapun rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

### VI.8.10. BEBAN LAIN-LAIN.

Beban lain-lain adalah beban berupa pengeluaran uang yang diberikan untuk bantuan kepada Partai Politik.

Untuk Tahun 2015 Beban lain-lain Pemerintah Kota Ternate terealisasi sebesar Rp813.109.720,00.

## VI.9. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2015, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp838.641.120.938,16 dan realisasi beban Rp786.831.741.755,00 maka Pemerintah Kota Ternate mengalami Surplus sebesar Rp51.728.628.183,16.

## VI.10. SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

### VI.10.1. SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Non Operasional pada Tahun 2015 adalah NIHIL.

#### VI.10.1.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2015 adalah NIHIL.

#### **VI.10.2. DEFISIT NON OPERASIONAL**

Defisit Non Operasional pada tahun 2015 adalah NIHIL.

##### **VI.10.2.1. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2015 NIHIL.

#### **VI.11. POS LUAR BIASA**

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- (c) kejadian di luar kendali Pemerintah Daerah

Untuk Tahun 2015 Beban Luar Biasa realisasinya sebesar Rp6.070.200.000,00.

#### **VI.12. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL**

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Kota Ternate Tahun 2015 yaitu sebesar Rp45.658.428.183,16.

#### **VI.13. KOMPONEN PERUBAHAN EKUITAS**

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir

##### **VI.13.1 EKUITAS AWAL**

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Ternate Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.914.667.729.425,98. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Pada Tahun 2014.

##### **VI.13.2 SURPLUS DEFISIT (LO)**

Surplus Defisit (LO) Pemerintah Kota Ternate Tahun 2015 adalah sebesar Rp45.658.428.183,16 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit LO.

##### **VI.13.3 EKUITAS AKHIR**



Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.248.434.805.872,24 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2014 sebesar Rp1.914.667.729.424,09 mengalami penurunan sebesar Rp666.232.923.553,74 atau turun 34,80%.

Nilai ekuitas akhir didapat juga karena adanya koreksi ekuitas lainnya dengan rincian sbb.:

Uraian	Nilai
Amortisasi Aset Lainnya 2014	(526.395.887,00)
Hibah ke pihak ketiga	(3.065.542.000,00)
Pengakuan Ekstra komptabel	(21.738.168.121,00)
Lelang Kendaraan	(2.235.567.532,00)
Kapitalisasi Aset	17.403.196.677,00
Beban dibayar dimuka	8.333.333,31
Penyusutan 2014	(704.132.212.511,00)
Penyisihan piutang 2014	(4.301.358,00)
Koreksi Salah klasifikasi belanja	3.236.184.210,41
Koreksi Investasi	(836.878.548,62)
<b>Jumlah</b>	<b>(711.891.351.736,90)</b>

#### VI.14. ASET

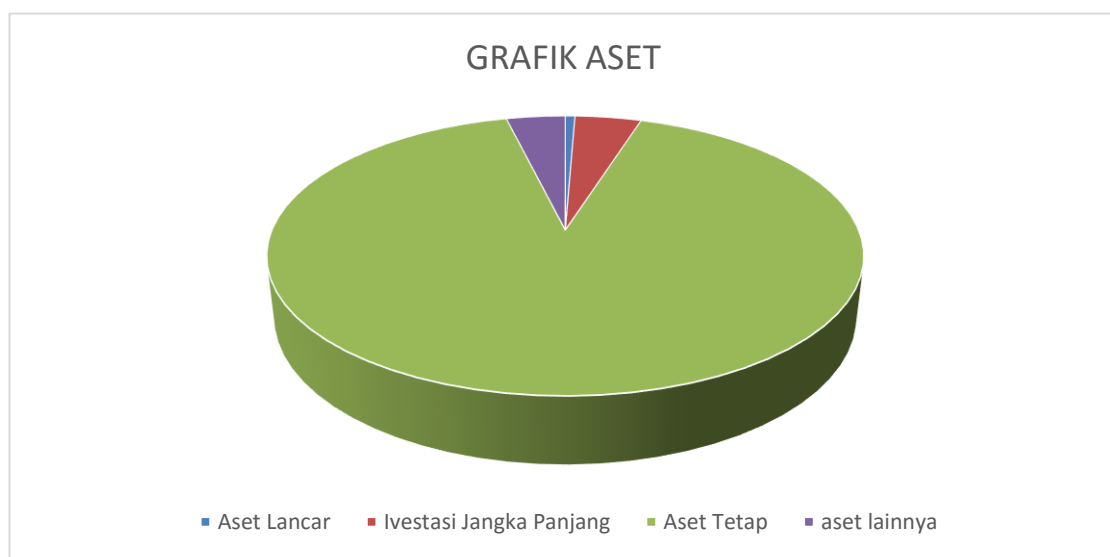
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Ternate terbagi dalam:

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Aset Lancar	27.062.407.256,58	34.339.222.817,70
2	Investasi Jangka Panjang	45.243.188.541,77	51.339.750.575,39
3	Aset Tetap	1.118.442.229.827,64	1.760.321.580.831,24
4	Aset Lainnya	71.997.808.138,25	68.667.630.064,65
	<b>Jumlah</b>	<b>1.262.745.633.764,24</b>	<b>1.914.668.184.288,98</b>

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi penurunan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebesar Rp651.922.550.524,74 atau 34,05%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sebagian besar terdiri

dari Aset Tetap, yaitu 89,89% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Ternate.

**Grafik VI.4. Komposisi Aset Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2015**



#### VI.14.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 31 Desember 2015 terdiri dari:

No	Uraian	31-Des-15		31-Des-14	
1	Kas dan Setara Kas		12.836.406.859,34		18.401.920.668,70
	a. Kas di kas Daerah	58.345.089,08		17.808.241.082,70	
	b. Kas di Bendahara Penerimaan	5.536.000,00		24.311.500,00	
	c. Kas di Bendahara Pengeluaran	414.298.605,00		50.648.336,00	
	d. Kas di FKTP	1.322.464.367,26			
	e. Kas Lainnya	11.035.762.798,00		543.031.250,00	
2	Piutang pendapatan		6.989.337.457,00		12.164.807.773,00
	a. Piutang Pajak Netto	6.130.484.982,00		12.164.807.773,00	
	b. Piutang Retribusi Netto	64.074.662,00			
	c. Piutang DBH Provinsi Netto	794.777.813,00			
3	Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		52.237.500,00		
4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		144.733.893,60		
5	Beban Dibayar Dimuka		95.056.666,64		
6	Persediaan		6.944.634.880,00		3.748.182.876,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>27.062.407.256,58</b>		<b>34.339.222.817,70</b>

##### VI.14.1.1 Kas di Kas Daerah

Akun kas di kas daerah per 31 Desember 2015 sebesar

Rp58.345.089,08 meliputi uang kas yang ada di bendahara umum daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk rekening giro dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening Giro	Nilai (Rp)
1	Bank Maluku Rek 0601022001	57.399.279,08
2	Bank Maluku Rek 0601002024	0,00
3	Bank Maluku Rek 0601002034	0,00
4	Bank Maluku Rek 0601002014	0,00
5	BNI Rek 0086130053	945.810,00
	Jumlah	58.345.089,08

#### VI.14.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk tahun 2015 sampai akhir tahun adalah Rp5.536.000,00 pada Dinas Kesehatan.

#### VI.14.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung sisa kas belanja dan kas pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Sisa Kas sampai akhir Tahun 2015 adalah sebesar Rp414.298.605,00 yang terdiri dari:

- a. Saldo kas belanja sebesar Rp338.428.741,00 berasal dari sisa kas belanja yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 yang terdiri dari :

No	SKPD	Sisa Belanja
1	Bappeda	60.439.024,00
2	SETDA	276.746.867,00
3	BP4K	1.092.850,00
4	Dinas Pasar	150.000,00
	JUMLAH	338.428.741,00

- b. Saldo Kas Pajak Pemerintah Pusat sebesar Rp75.869.864,00 berasal dari saldo kas Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum di setor ke kas Negara rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Sisa Belanja
1	Diknas	14.084.386,00
2	SETDA	18.195.982,00
3	DPKAD	2.150.723,00
4	BPBD	7.038.273,00
4	Dinas Perhubungan	34.400.500,00

	JUMLAH	75.869.864,00
--	--------	---------------

#### VI.14.1.4. Kas di FKTP

Kas di FKTP merupakan akun untuk menampung saldo kas yang ada pada Bendahara Kapitasi (JKN) di Puskesmas per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.322.464.367.26 dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA FKTP	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Puskesmas Jambula	14.612.979,00	197.973.135,11	123.786.026,92	88.800.087,19
2	Puskesmas Gambesi	36.134.458,00	205.834.343,97	193.143.217,66	48.825.584,31
3	Puskesmas Kalumata	101.685.569,00	646.612.364,32	516.656.472,71	231.641.460,61
4	Puskesmas Kalumpang	16.301.088,00	290.569.274,81	224.802.282,02	82.068.080,79
5	Puskesmas Kota	75.215.046,00	326.315.468,39	190.718.375,52	210.812.138,87
6	Puskesmas Sulamadaha	34.049.968,00	298.090.275,42	229.336.718,78	102.803.524,64
7	Puskesmas Siko	168.522.430,00	621.646.016,78	521.766.889,30	268.401.557,48
8	Puskesmas Mayau	11.466.666,00	107.617.540,88	43.331.408,08	75.752.798,80
9	Puskesmas Hiri	23.629.926,00	161.844.282,79	128.492.222,75	56.981.986,04
10	Puskesmas Moti	61.413.121,00	224.708.753,23	129.744.725,70	156.377.148,53
	<b>Total</b>	<b>543.031.251,00</b>	<b>3.081.211.455,70</b>	<b>2.301.778.339,44</b>	<b>1.322.464.367,26</b>

#### VI.14.1.5 Kas Lainnya

Kas lainnya merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran, maupun Kas di FKTP. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.035.762.798,00 merupakan saldo kas yang ada di Rekening Retur, dimana untuk pembayaran dana sertifikasi guru sebesar Rp5.946.678.315,00 dan dana untuk pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan) sebesar Rp5.089.084.483,00. Dana tersebut sampai dengan 31 Desember 2015 belum sempat disalurkan kepada guru dan rekanan.

#### VI.14.1.6 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Ternate dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Piutang 2015	Piutang 2014
----	--------	--------------	--------------

No	Uraian	Piutang 2015	Piutang 2014
1	Piutang Pajak	6.625.504.725,00	5.354.562.799,00
	Penyisihan	(495.019.743,00)	
	Piutang Pajak Netto	6.130.484.982,00	
2	Piutang retribusi	67.422.000,00	62.027.629,00
	Penyisihan	(3.347.338,00)	
	Piutang retribusi Netto	64.074.662,00	
3	Piutang bagi hasil Propinsi	798.771.671,00	6.748.217.345,00
	Penyisihan	(3.993.858,00)	
	Piutang bagi hasil Propinsi Netto	794.777.813,00	
	<b>JUMLAH PIUTANG NETTO</b>	<b>6.989.337.457,00</b>	<b>12.164.807.773,00</b>

- a. Piutang Pajak, akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Piutang Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang Pajak per 31 Desember 2015 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Piutang 2015	Piutang 2014
Pajak Hotel	2.169.110.140,00	2.239.588.969,00
Pajak Restoran	1.441.474.341,00	1.472.761.727,00
Pajak Reklame	194.419.925,00	91.130.375,00
Pajak Air Tanah	149.488.741,00	6.372.132,00
Pajak Bumi dan Bangunan	2.671.011.578,00	1.536.797.709,00
<b>JUMLAH</b>	<b>6.625.504.725,0</b>	<b>5.346.650.912,0</b>

- c. Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Ternate merupakan piutang pada pelayanan Dinas Pasar sebesar Rp67.422.000,00.
- d. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, terutama Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp798.771.671,00.
- e. Penyisihan Piutang pendapatan  
Penyisihan Piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang per tanggal 31 Desember 2015 terdiri dari:

No	Uraian	Piutang	Penyisihan
1	Pajak Hotel	2.169.110.140,00	204.226.035,00
2	Pajak Restoran	1.441.474.341,00	155.347.434,00
3	Pajak Reklame	194.419.925,00	1.409.624,00
4	Pajak Air Tanah	149.543.285,00	6.760.245,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan	2.671.011.578,00	127.541.542,00
6	Retribusi Pasar	67.422.000,00	3.037.200,00
7	Dana Bagi hasil propinsi	798.771.671,00	3.993.858,00

	7.491.752.940,00
	502.315.938,00

Perhitungan lebih rinci untuk perhitungan penyisihan piutang pendapatan dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

#### VI.14.1.7 Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran adalah saldo dari penjualan kendaraan bermotor sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum di lunasi sebesar Rp52.237.500,00 yang sudah dikurangi penyisihan sebesar 0,05% (52.500.000,00-262.500,00).

#### VI.14.1.8 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto

Bagian lancar tuntutan ganti rugi netto saldo sebesar Rp144.733.893,60 adalah reklas dari aset lainnya tagihan jangka panjang TP TGR yang sudah jatuh tempo atau akan jatuh tempo 12 bulan kedepan. dan telah di kurangi dengan biaya penyisihan piutang 2015 (Rp229.272.104,00- Rp84.538.210,40). Rincian dari bagian lancar TP TGR sebesar Rp229.272.104,00 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Kasus	Tgl SKTJM	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Sisa per 31 Des 2015
1.	Novita Yanti	Penggunaan uang belanja TA 2012 untuk kepentingan pribadi an. Mantan bendahara Ktr KB	29 Des 2014	24 bulan	29 Des 2016	38.305.642,00
2.	Asian Hi.Rufai	Kehilangan kas pada Kecamatan Hiri Tahun 2012	24 Des 2014	24 Bulan	24 Des 2016	17.926.462,00
3.	Siti Nur Nelny Teng, SE	Penggunaan uang belanja untuk kepentingan pribadi di SKPD Kecamatan Ternate Tengah	4 Mei 2012	24 Bulan	4 Mei 2014	154.050.000,00
4.	Lenny Marlina Ponto	TGR atas tindak lanjut temuan perjalanan Dinas oleh BPK Tahun 2011 & 2012 ( yg sudah ada SKTJM)	4 Nov 2014	30 hari	4 Des 2014	8.350.000,00
5.	Sutopo Abdullah		4 Nov 2014	30 hari	4 Des 2014	3.350.000,00
6.	Andry Handoko		4 Nov 2014	30 hari	4 Des 2014	6.750.000,00
7.	M. T Arsyad		4 Nov 2014	30 hari	4 Des 2014	540.000,00
<b>JUMLAH</b>						<b>229.272.104,00</b>

#### VI.14.1.9 Beban dibayar dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp95.056.666,64 yang berasal dari beban yang sudah dibayar dan manfaatnya belum seluruhnya di terima. Rincian dalam tabel berikut :

NO	SKPD	URAIAN	BEBAN DIBAYAR DIMUKA
1	DPKAD	Beban sewa jaringan VPN	68.640.000,00
2	BAPPEDA	Beban sewa internet	8.916.666,63
3	KEC. BATANG DUA	Beban sewa rumah dinas	2.916.666,63
4	KEC. HIRI	Beban sewa rumah dinas	8.333.333,31

5	KPPPA	Beban sewa rumah AMAN	6.250.000,07
JUMLAH			95.056.666,64

Perhitungan baban dibayar dimuka lebih detil dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

#### VI.14.1.10. Persediaan

Akun persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Ternate dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember 2015 terdiri dari Barang Pakai Habis, Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan blanko KTP/KK dan barang berupa tanah dan peralatan dan mesin yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga di tahun 2015.

Rincian persediaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Nilai	Koreksi Tambah	Nilai (Rp)
1	Diknas	440.000,00	50.388.800,00	50.828.800
2	Dinkes	2.083.896.930,00	43.742.600,00	2.127.639.530
3	PU	646.000,00	3.814.704.000,00	3.815.350.000
4	Pemadam	38.720.000,00		38.720.000
5	Tata kota	35.420.000,00		35.420.000
6	Bappeda	587.950,00		587.950
7	Badan Lingkungan Hidup	146.000,00		146.000
8	Capil	80.740.000,00		80.740.000
9	Tenaga Kerja	417.500,00		417.500
10	KESBANG	320.000,00		320.000
11	PARIWISATA	134.420,00		134.420
12	Sekretariat DPRD	945.450,00		945.450
13	DPKAD	10.408.800,00		10.408.800
14	Inspektorat	820.900,00		820.900
15	BP2TSP	586.000,00		586.000
16	BP4K	222.500,00		222.500
17	Dinas Pendapatan	653.942.030,00		653.942.030
18	Dinas Pasar	105.000,00		105.000
19	DKP	0,00	127.300.000	127.300.000
	<b>JUMLAH</b>	2.908.499.480,00	3.908.835.400,00	6.944.634.880,00

Koreksi tambah pada Dinas Pendidikan dan pada Dinas Kesehatan masing-masing Rp50.388.800,00 dan Rp43.742.600,00 merupakan barang habis pakai yang berasal dari kontrak pengadaan belanja modal.

Koreksi tambah pada Dinas PU sebesar Rp3.814.704.000,00 adalah berupa gedung dan bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, sedangkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan persediaan sebesar Rp127.300.000 merupakan 1 unit mesin motor tempel 40 PK sebesar Rp46.750.000,00 dan 3

unit mesin tempel 3 PK @Rp 26.850.000,00 yang berasal dari Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, namun sampai dengan 31 Desember 2015 belum sempat disalurkan atau diterima masyarakat/pihak ketiga.

#### VI.14.2. Investasi Jangka Panjang

Akun Investasi adalah untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Per 31 Desember 2015, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp45.243.188.541,77 yang dimiliki Pemerintah Kota Ternate seluruhnya dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Permanen.

##### VI.14.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya.

Saldo Investasi Non Permanen lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0 (nihil) dan Rp80.751.000,00. Investasi non permanen lainnya tersebut berupa Dana Bergulir yang di kelola oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Ternate.

Pemerintah Kota Ternate telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir, yang menentukan Klasifikasi ketertagihan dan bergulir berdasarkan umur dana bergulir sebagai berikut :

- a. Dapat ditagih, jika umur piutang 1-2 tahun dari jadwal jatuh tempo pinjaman
- b. Diragukan data ditagih, jika umur piutang 2-3 tahun dari jadwal jatuh tempo pinjaman
- c. Tidak dapat ditagih, jika umur piutang lebih dari 3 tahun dari jadwal jatuh tempo.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dari total nilai dana debitur, setelah dilakukan perbandingan umur piutang per debitur, diketahui nilai dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah sebesar piutang dana bergulir yang dapat ditagih, yaitu sebesar Rp0 (nihil).

##### VI.14.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Pemerintah Kota Ternate memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada :

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
PT. Bank Maluku	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
PD. Citra Gamalama	0	3.219.488.795,00
PDAM	24.482.778.698,18	35.611.927.434,00
BPR Syariah Bahari Berkesan	0	9.050.000.000,00
PT. Bahari Berkesan ( Holding Company )	17.260.409.843,59	
	45.243.188.541,77	51.381.416.229,00



Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.

- a. Jumlah Penyertaan Modal pada Bank Maluku adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 berdasarkan atas kepemilikan 400 saham (Nomor A BM 0016501 s/d 0016900).

No	Penyertaan Modal PT. Bank Maluku	Nilai
1	Sampai Dengan 2005	500.000.000,00
2	Penambahan tahun 2006	500.000.000,00
3	Penambahan tahun 2007	500.000.000,00
4	Penambahan tahun 2009	500.000.000,00
5	Penambahan tahun 2012	500.000.000,00
6	Penambahan tahun 2013	500.000.000,00
7	Penambahan tahun 2014	500.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	3.500.000.000,00

Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Ternate terhadap Bank Maluku yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada Bank Maluku dicatat dengan menggunakan metode biaya.

- b. Sesuai Neraca Audited PDAM per 31 Desember 2015 menunjukkan bahwa jumlah Ekuitas sebesar Rp53.493.214.017 dan berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kota Ternate tahun 2015 (*audited*) tersebut diketahui pada tahun 2015 PDAM mengalami kerugian sebesar Rp2.722.851.295,00. dimana nilai kepemilikan Pemerintah Kota Ternate atas nilai aset pada PDAM adalah sebesar 46%, penyertaan modal dalam bentuk aset tetap (aset lainnya, instalasi dan jaringan, bangunan, gedung dan bangunan, alat angkutan serta dana tunai) dimana dari persentase tersebut nilai investasi Pemerintah Kota ternate pada PDAM adalah sebesar Rp24.482.778.698,18 (Rp53.493.214.017,52 x 46%).
- c. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Ternate sesuai Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014, Membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas atau PT Ternate Bahari Berkesan, dengan tujuan didirikannya Perseroan adalah :
- Sebagai Perusahaan induk (*Holding Company*) bagi BUMD yang telah dan akan didirikan Pemerintah Kota Ternate.
  - Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Kota Ternate.
  - Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Kota Ternate.

Modal dasar PT. Ternate Bahari Berkesan berasal dari pemasukan (*inbrenng*) saham-saham milik Pemerintah Kota Ternate pada PD Apotik Bahari berkesan, PT. BPRS Bahari Berkesan dan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah *Holding Company* Perseroan

Terbatas Ternate Bahari Berkesan ini maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Citra Gamalama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Aset PD. Citra Gamalama menjadi Aset PT. Ternate Bahari Berkesan.

Setelah dilakukan Konsolidasi atas Laporan Keuangan perusahaan-perusahaan daerah tersebut dapat dilihat pada Lampiran diketahui jumlah investasi pemerintah Kota ternate untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp18.219.600.000,00 dengan akumulasi Laba/rugi sebesar (Rp959.190.156,41) sehingga jumlah penyertaan modal bersih adalah sebesar Rp17.260.409.843.,59 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

**. BPRS BAHARI BERKESAN**

No	Nama	Jumlah saham (lembar)	Nominal (Rp)	Persentase
1	Pemerintah Kota Ternate	8000	8.000.000.000,00	96,79 %
2	Ir. Arifin Jafar	20	20.000.000,00	0,24 %
3	Hj. Nursia Abdul Haris	95	95.000.000,00	1,15 %
4	Muhammad Hasan Bay	150	150.000.000,00	1,81 %
	Total	8.265	8.265.000.000,00	100,00%

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 (unaudited), Jumlah modal disetor yang tercatat, telah sama dengan hasil RUPS, yaitu sebesar Rp8.265.000.000,00 dengan Kepemilikan Pemerintah Kota Sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 96,79 %.

**PT. ALGA KASTELA BAHARI BERKESAN**

No	Nama	Jumlah saham (lembar)	Nominal (Rp)	Persentase
1	Pemerintah Kota Ternate	3250	3.250.000.000,00	99,69%
2	Ir. I Gusti Ayu Nyoman S.	10	10.000.000,00	0,31%
	Total	3260	3.260.000.000,00	100,00%

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. ALGA KASTELA untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 Jumlah modal disetor yang tercatat sebesar Rp3.260.000.000,00. Dengan kepemilikan pemerintah kota sebesar Rp3.250.000.000,00 atau 99.69 %

**PT. TERNATE BAHARI BERKESAN (HOLDING COMPANY)**

Nilai Ekuitas Tahun Berjalan

No	Nama Perusahaan	Ekuitas	Eliminasi Saham	Persentase	Kepemilikan Pemkot Ternate
1	PT. BPRS Bahari Berkesan	8.265.000.000		96,79%	8.000.000.000
2	PT. Alga Kastela Bahari Berkesan	3.260.000.000		99,69%	3.250.000.000
3	PD. Citra Gamalama	5.369.600.000	2.750.000.000	100%	2.619.600.000

Desember  
31, 2015

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

4	PT. Holding Company	5,350.000.000	1.000.0000.000	100%	4.350.000.000
	<b>Total Kepemilikan</b>			<b>99.12%</b>	<b>18.219.600.000</b>

Kepemilikan saham Pemerintah Kota Ternate pada PT. Ternate Bahari Berkesan dan anak perusahaan adalah sebesar Rp18.219.600.000 atau 99.12%.

Laba (Rugi) Tahun berjalan

No	Perusahaan	Laba ( Rugi) Berjalan	Laba (Rugi) Tahun lalu	Total Laba (rugi)	Persentase	Kepemilikan Ekuitas
1	BPRS BAHARI BERKESAN	908.793.449,85		908.793.449,85	96,79%	879.621.180,11
2	PT. ALGA KASTELA	250.515.507,00	(894.649.834,00)	(644.134.327,00)	99,69%	(642.137.510,59)
3	PD.CITRA GAMALAMA	(176.074.257,00)	(688.862.090,00)	(864.936.347,00)	100%	(864.936.347,00)
4	PT. HOLDING COMPANY	(274.421.790,93)	(57.315.688,00)	(331.737.478,93)	100%	(331.737.478,93)
	<b>Total</b>	<b>708.812.908,92</b>	<b>(1.640.827.612,00)</b>	<b>(932.014.703,08)</b>	<b>99,12%</b>	<b>(959.190.156,41)</b>

Laba (Rugi) tahun berjalan Pemerintah Kota Ternate pada PT. Ternate Bahari Berkesan dan anak perusahaan adalah sebesar (Rp959.190.156,41).

Nilai Ekuitas PT. Ternate Bahari Berkesan ( *Holding Company*) 2015

No	Perusahaan	Total Ekuitas 2015	Total Rugi 2015	Sisa Kepemilikan Ekuitas Pemkot Ternate
	<b>PT.Ternate Bahari Berkesan</b>	<b>18.219.600.000,00</b>	<b>(959.190.156,41)</b>	<b>17.260.409.843,59</b>

Sisa kepemilikan ekuitas Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2015 adalah sebesar **Rp17.260.409.843.59** hal ini diperoleh dari total ekuitas 2015 sebesar **Rp18.219.600.000** dikurangi total kerugian 2015 sebesar **(Rp959.190.156.41)**.

### VI.14.3. Aset Tetap

Jumlah pada pos aset tetap sebesar **Rp1.118.442.229.827,64** merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sampai dengan 31 Desember 2015, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

Jenis Aset	Saldo 31 Des. 2014	Penambahan	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Saldo 31 Des 2015
Tanah	224.668.832.710,00	8.654.567.750,00	669.008.000,00	5.610.944.000,00	228.381.464.460,00
Peralatan dan Mesin	158.519.231.922,50	26.201.398.550,29	2.776.134.744,85	11.607.626.682,29	175.889.138.535,35
Gedung dan Bangunan	709.560.599.933,22	62.770.011.283,24	24.165.700.014,00	27.072.989.989,00	769.423.321.241,46
Jalan, irigasi dan Jaringan	580.690.956.520,52	49.332.257.968,52	45.246.095.127,00	3.201.096.376,00	672.068.213.240,04
Aset tetap lainnya	15.802.580.526,00	3.277.082.196,50	2.251.460.000,00	1.154.794.960,50	20.176.327.762,00
Konstruksi dlm Pekerjaan	71.079.379.219,00	0	19.991.148.322,79	51.560.748.107,00	39.509.779.434,79
Akumulasi Penyusutan	0	0	(787.006.014.846,00)	0	(787.006.014.846,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.760.321.580.831,24</b>	<b>150.235.317.748,55</b>	<b>-691.906.468.637,36</b>	<b>100.208.200.114,79</b>	<b>1.118.442.229.827,64</b>

Mutasi Penambahan Aset Tetap selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2015	Rp	<b>1.760.321.580.831,24</b>
Realisasi Belanja Modal Tahun 2015	Rp	150.235.317.748,55
<i>Extracomptable</i>	Rp	(4.320.513.074,00)

Penambahan dari Belanja Modal		145.914.804.674,55
Koreksi tambah terdiri :		

- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan jasa	Rp	2.519.184.000,00
- Hibah	Rp	4.824.906.525,00
- Koreksi tambah (kurang catat)	Rp	128.177.750,00
- Kapitalisasi dari Dana Tidak Terduga	Rp	4.530.370.000,00
- Reklasifikasi	Rp	76.442.668.124,79
- Mutasi (Perpindahan status Penggunaan)	Rp	6.654.239.807,00
- Pembulatan	Rp	1,85

Jumlah Koreksi tambah	Rp	95.099.546.208,64
Akumulasi Penyusutan	Rp	(787.006.014.846,00)
Jumlah	<b>Rp</b>	<b>(691.906.468.637,36)</b>

Koreksi Kurang terdiri :

- Hibah Belanja Modal 2015		3.886.756.031,50
- Hibah dari Aset tahun sebelumnya		540.000.000,00
- SK Penghapusan		2.400.467.532,00
- Mutasi (Pindah status Penggunaan)		5.746.179.807,00
- Reklasifikasi		80.731.333.125,00
- Koreksi <i>Extracomptable</i> < tahun 2008		2.582.950.545,00
- Koreksi <i>Extracomptable</i>		4.320.513.074,29

**Jumlah Koreksi Kurang** **100.208.200.114,79**

**Saldo per 31-12- 2015** **Rp 1.118.442.229.827,64**

Penjelasan mutasi aset tetap selama tahun 2015 sebagai berikut:

- 1). Mutasi tambah aset yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan pertambahan aset dari belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi karena memenuhi kriteria sebagai aset.

a. Penambahan

Penambahan yang di peroleh dari Realisasi Belanja Modal selama tahun anggaran 2015 yang terdiri dari realisasi belanja modal tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp150.235.317.748,55 (*Lampiran 6*). Dalam pencatatan pengakuan Penambahan Aset tetap sebesar Rp145.914.804.674,55 termasuk

aset lainnya sebesar Rp151.660.000,00 adalah belanja modal yang realisasinya berupa Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari belanja modal *software* pada Dinas Pendapatan sebesar Rp59.660.000 dan Badan Perencanaan Daerah sebesar Rp92.000.000 dan tidak diakui sebagai penambahan Aset Tetap karena tidak memenuhi kriteria aset sebesar Rp4.320.513.074,29.

b. Koreksi Tambah

Koreksi tambah Aset tahun 2015 sebesar Rp95.099.546.206,79 berasal dari:

- Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi ke dalam belanja modal karena memenuhi kriteria sebagai penambahan Aset sebesar Rp2.519.184.000,00, terdiri dari Peralatan dan Mesin Rp376.489.000,00, Gedung dan Bangunan Rp1.068.636.000,00, Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp718.736.567,00, Aset Tetap Lainnya Rp54.065.000,00 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp301.257.433,00.
- Penerimaan Hibah sebesar Rp4.824.906.525,00 dari Kementerian Perikanan dan Kelautan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp4.286.406.525,00 berupa Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jaringan dan Irigasi ditambah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa 2 unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diperoleh dari BNPB senilai Rp538.500.000,00.
- Koreksi tambah sebesar Rp128.177.750,00 dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan yang pada tahun 2014 pencatatan, aset berupa Kamera digital diakui sebagai aset *extracomptable*, seharusnya adalah *intracomptable* sebesar Rp2.389.750,00 dan pada Dinas Pendidikan Nasional Aset Tanah SD Inpres Siko belum memiliki nilai, sehingga pada tahun 2015 dilakukan penilaian berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp125.788.000,00
- Kapitalisasi dari Belanja Dana Tidak Terduga yang dananya digunakan untuk pembuatan Jalan, Irigasi dan jaringan sebesar Rp4.530.370.000,00
- Penambahan dari perpindahan (*reklasifikasi*) Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa gedung dan bangunan yang telah selesai tahun 2015, dan reklasifikasi karena kesalahan penganggaran sebesar Rp76.442.668.124,79
- Perpindahan status penggunaan aset antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp6.654.239.807,00.
- Pembulatan Rp1,85 dari peralatan mesin

c. Koreksi Kurang

Koreksi Kurang Aset Pemerintah Kota Ternate tahun 2015 sebesar Rp100.208.200.114,79 yang disebabkan oleh realisasi belanja modal tahun 2015 yang diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar

Rp3.886.756.031,50 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel : Realisasi Belanja Modal yang Diserahkan Ke Pihak Ketiga

No	SKPD	Nilai Hibah
1	Sekretariat Daerah	Rp. 368.530.000,00
2	Dinas Pendidikan Nasional	Rp. 3.282.366.031,50
3	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	Rp. 13.360.000,00
4	Dinas Pasar	Rp. 222.500.000,00
	Jumlah	Rp. 3.886.756.031,50

- Hibah Tanah sebesar Rp540.000.000,00 kepada Badan Amil Zakat Kota Ternate.
- Pada tahun 2015 terdapat 23 unit kendaraan bermotor yang dihapuskan dari Daftar inventaris Barang Milik Daerah sebesar Rp2.400.467.532,00 dan telah dipindahtangankan dengan cara lelang terbatas.
- Koreksi kurang perpindahan status Penggunaan aset antar SKPD dalam Lingkungan Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp5.746.179.807,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp908.060.000,00 dibandingkan dengan koreksi tambah aset karena pada tahun 2015 Kantor Kecamatan Moti baru mengakui mutasi Peralatan dan Mesin berupa genset dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan yang status penggunaan aset tersebut telah diserahkan sejak tahun 2009.
- Reklasifikasi Aset sebesar Rp80.731.333.125,00 terdiri dari reklasifikasi Aset tetap tanah sebesar Rp5.070.944.000 ke aset tetap lainnya, peralatan mesin sebesar Rp218.641.460,00, Reklasifikasi aset pada gedung dan bangunan sebesar Rp20.003.818.182,00, pada jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp3.201.096.376,00, pada aset tetap lainnya sebesar Rp676.085.000,00, dan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp51.560.748.107,00
- Koreksi kurang aset dengan Harga satuan dibawah Rp1.000.000 (*extracomptable*) Peralatan dan Mesin Sebesar tahun 2008 kebawah Rp2.582.950.545
- Koreksi kurang aset dengan Harga satuan dibawah Rp1.000.000 (*extracomptable*) Peralatan dan Mesin Sebesar 4.320.513.074,29

Penjelasan Mutasi Aset tahun 2015 dirinci sebagai berikut:

Tanah:

Mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2015	Rp	224.668.832.710,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2015	Rp	8.654.567.750,00
Koreksi tambah :		
- Reklasifikasi	Rp	543.220.000,00
- Koreksi tambah (kurang catat)		
	Rp	125.788.000,00
Koreksi Kurang :	Rp	
- Hibah		(540.000.000,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya		(5.070.944.000,00)
Saldo per 31-12- 2015	<b>Rp</b>	<b>228.381.464.460,00</b>

Mutasi aset tetap tanah diperoleh :

**1). Penambahan**

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2015 sebesar Rp8.654.567.750,00. Nilai tersebut berasal dari pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pada Sekretariat Daerah Rp7.430.698.750,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp1.025.690.000,00 dan Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp198.179.000,00.

**2). Koreksi Tambah**

- a. Penambahan aset tanah dari Pelaksanaan kegiatan tahun 2015 sebesar Rp543.220.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum berupa Pengerasan/tanah timbunan di kawasan Dodoku Ali sebesar Rp393.500.000,00 yang menggunakan rekening Belanja Modal gedung dan bangunan. Dan Penambahan aset tanah dari pelaksanaan kegiatan Pengadaan taman Kahati pada Badan Lingkungan hidup sebesar Rp149.720.000,00, yang menggunakan rekening aset tetap lainnya.
- b. Penambahan nilai Aset Tanah pada Dinas Pendidikan Nasional SD Inpres Siko belum memiliki nilai, sehingga pada tahun 2015 dilakukan penilaian berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp125.788.000,00

**3). Koreksi Kurang**

- a. Koreksi kurang aset tetap tanah sebesar Rp540.000.000,00 disebabkan karena terdapat aset tanah seluas 3.336 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Gamalama (eks Mess Persiter) dihibahkan kepada Badan Amil Zakat Kota Ternate berdasarkan Keputusan Walikota Ternate No. 130/II.4/KT/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate dari daftar Barang Milik Daerah, dan Berita Acara Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate Nomor 020/278/2015 tanggal 5 Agustus 2015.
- b. Reklasifikasi Aset tanah sebesar Rp5.070.944.000,00, karena terdapat aset tanah yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.847.075.000,00 direklasifikasi ke aset lainnya, dan pembangunan dermaga Jikomalamo di Kelurahan Tomajiko sebesar Rp1.025.690.000,00 yang menggunakan rekening belanja modal

tanah, sehingga direklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan. Terdapat kegiatan pembuatan Kolam Benih dan Ikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp198.179.000,00 yang menggunakan rekening belanja modal tanah, sehingga direklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan jaringan.

Nilai Tanah sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp228.381.464.460,00 adalah nilai tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate berupa tanah kosong/lapangan, tanah untuk gedung dan bangunan, tanah untuk konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah sekitar daerah irigasi, berupa tanah hak milik, hak pakai dan hak guna bangunan/pengelolaan yang terdiri dari 603 Bidang tanah. Sampai dengan tahun 2015 jumlah tanah Pemerintah Kota Ternate yang belum memiliki sertifikat sebanyak 510 bidang tanah dan yang bersertifikat sebanyak 93, termasuk dengan 1 (satu) bidang tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ke tiga.

Proses sertifikasi tanah Pemerintah Kota Ternate akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Uraian kepemilikan tanah disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Jumlah Bidang Tanah	Rp	Nilai
Tanah yang telah memiliki sertifikat	93	Rp	76.088.051,55
Tanah yang Belum memiliki Sertifikat	510	Rp	156.014.699,91
<b>Jumlah</b>	<b>603</b>	<b>Rp</b>	<b>228.381.464,00</b>

#### Peralatan dan Mesin

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2015	Rp	158.519.231.922,50
Realisasi Belanja Modal Tahun 2015	Rp	26.201.398.550,29
Koreksi tambah :	Rp	2.776.134.743,00
Koreksi Kurang :	Rp	(11.607.626.682,29)

Saldo per 31-12- 2015	<b>Rp</b>	<b>175.889.138.533,50</b>
-----------------------	-----------	---------------------------

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin diperoleh:

#### 1). Penambahan

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2015, berasal dari pelaksanaan kegiatan belanja modal selama tahun 2015 sebesar Rp26.201.398.550,29

#### 2). Koreksi Tambah

Koreksi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.776.134.744,85 terdiri



dari:

- a) Reklasifikasi sebesar Rp242.764.468,00 terdiri dari:
- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Sekretariat DPRD sebesar        | Rp22.880.000,00  |
| 2. Sekretariat Daerah sebesar      | Rp7.500.000,00   |
| 3. Dinas Tata Kota dan Pertamanan  | Rp113.359.468,00 |
| 4. Inspektorat                     | Rp9.790.000,00   |
| 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Rp89.235.000,00  |
- b) Penerimaan Hibah sebesar Rp1.061.845.525 terdiri dari :
- i. Koreksi tambah aset peralatan dan mesin pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp523.345.525,00 disebabkan karena adanya Penerimaan Hibah sejak tahun 2012 s/d 2014 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp4.311.036.525,00 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Penyerahan masing-masing :
    - Nomor BA. 082/P2HP.0/PL.430/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 senilai Rp. 961.180.000,00;
    - Nomor BA. 3201/P2HP. 0/PL. 430/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp651.381.000,00
    - Nomor B.924/KP3K/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 senilai Rp 317.520.525,00;
    - Nomor 7699/DJPT.0/PL. 430.s1/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 senilai Rp. 1.701.080.000,00 berupa dermaga;
    - Nomor B. 20a/KP3K/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 655.245.000,00 berupa barang penunjang Kegiatan Dekonstrasi.
  - ii. Dari jumlah hibah tersebut diatas yang diakui sebagai aset sebesar Rp.4.286.406.525,00 sedangkan sisa senilai Rp.24.630.000,00 tidak dapat diakui sebagai pertambahan aset karena tidak memenuhi batas kapitalisasi BMD (*extra countable*), daftar terlampir.
  - iii. Dari jumlah hibah sebesar Rp. 4.286.406.525,00 sebesar Rp.523.345.525,00 merupakan pertambahan aset Peralatan dan Mesin, dan sisanya sebesar Rp. 1.098.551.000,00 adalah pertambahan aset Gedung dan Bangunan serta sebesar Rp.2.664.510.000,00 adalah aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
  - iv. Penerimaan Hibah sebesar Rp. 4.311.036.525,00 sebagaimana disebutkan diatas, dapat diakui sebagai penerimaan hibah pada 2015 karena Berita Acara Hibah diterima pada tahun 2015.
  - v. Selanjutnya, Hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa 2 unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp. 538.500.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. BA.32.9/11-12/PBNPB/2015 tanggal 11 Desember 2015.
- c) Mutasi pindah status Penggunaan SKPD sebesar Rp1.092.646.000,00 terdiri dari:
- i. Mutasi tambah pada Kantor Kecamatan Ternate Utara berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor sebesar Rp 18.256.000,00 dari Sekretariat Daerah.

- ii. Mutasi tambah pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan sebesar Rp.19.363.000,00 dari Badan Lingkungan Hidup berupa kendaraan roda 2(dua) DG. 2359 KT merk Honda Supra, sesuai Berita Acara Nomor 660.1/125/BLH/Kota-TTe/2015 tanggal 8 September 2015.
- iii. Terdapat mutasi dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan berupa genset senilai Rp908.060.000,00 ke kantor kecamatan Moti sesuai Berita Acara Nomor 671/635.a/BA/DTKP/2009 tanggal 6 Januari 2009, tetapi dicatat oleh pengurus barang Kecamatan Moti pada tahun 2015.
- iv. Mutasi tambah ke Sekretariat Daerah sebesar Rp146.967.000,00 berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 merk Daihatsu APV (DG 113 KT) dari Kantor Kecamatan Tengah, sesuai Berita Acara Nomor 028/252/2015 tanggal 14 September 2015.
- d) Koreksi tambah pada pencatatan Dinas Tata Kota dan Pertamanan yang pada tahun 2014, aset berupa Kamera digital yang diakui sebagai aset *extracomptable*, seharusnya adalah *intracomptable* dan telah dilakukan pencatatan dengan nilai aset sebesar Rp2.389.750,00
- e) Koreksi tambah sebesar Rp376.489.000 yang terdiri dari Dinas Kesehatan senilai Rp370.689.000 dan Sanggar Kegiatan Belajar senilai Rp5.800.000,00 yang merupakan belanja barang dan jasa tetapi memenuhi kriteria sebagai penambahan aset tetap;
- f) Koreksi tambah dari pembulatan sebesar Rp1,85

### 3). Koreksi Kurang

Koreksi kurang aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp11.607.626.682,29 karena reklasifikasi, pindah status penggunaan, lelang aset kendaraan yang dihapuskan, hibah dan koreksi pencatatan aset tetap yang nilainya masih dibawah batas kapitalisasi dari tahun 2008 dan sebelumnya.

- a) Reklasifikasi sesuai dengan jenis obyek aset sebesar Rp218.641.460,00
- b) Pindah status penggunaan sebesar Rp184.586.000,00, terdiri dari:
  - a. Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Kantor Kecamatan Temate Utara berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp18.256.000,00
  - b. Mutasi dari Badan Lingkungan Hidup ke dinas Tata Kota dan Pertamanan berupa kendaraan roda 2(dua) DG 2359 KT merk Honda Supra sebesar Rp19.363.000,00
  - c. Mutasi dari Kantor Kecamatan Tengah ke Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 merk Daihatsu APV (DG 113 KT) dengan nilai aset sebesar Rp146.967.000,00
- c) Pada tahun 2015 terdapat 23 unit kendaraan bermotor yang dihapuskan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah sebesar Rp2.400.467.532,00 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 111/II.4/KT/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 121/II.4/KT/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Rincian kendaraan lelang tahun 2015

sebagaimana termuat pada *Lampiran 7*.

- d) Mutasi Kurang berupa hibah sebesar Rp1.902.283.071,00 terdiri dari :
- Hibah kendaraan Roda 4 senilai Rp 368.530.000,00 dari Sekretariat Daerah ke Kejaksaan Negeri Ternate berdasarkan berita acara serah terima Nomor 024/179/2015 tanggal 7 Mei 2015.
  - Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.520.393.071,00 dari Dinas Pendidikan Nasional ke sekolah swasta di Kota Ternate yang terdiri dari meubelair sebesar Rp327.047.700,00, alat-alat laboratorium Rp1.193.345.371,00 daftar sekolah penerima hibah termuat pada *Lampiran 8*.
  - Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.360.000,00 berupa bantuan peralatan dan bahan Kegiatan Pemberdayaan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 560/151/II/2015 tanggal 28 Februari 2015.
- e) Koreksi kurang aset dengan Harga satuan dibawah Rp1.000.000,00 (*extra comptable*) Peralatan dan Mesin sebesar tahun 2008 kebawah Rp 2.582.950.545,00
- f) Koreksi kurang aset dengan Harga satuan dibawah Rp1.000.000,00 (*extra comptable*) Peralatan dan Mesin sebesar tahun 2015 Rp4.318.698.074,29

#### Gedung dan Bangunan

Mutasi Aset Gedung dan Bangunan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2015	Rp	709.560.599.933,22
Realisasi Belanja Modal Tahun 2015	Rp	62.770.011.283,24
Koreksi tambah :	Rp	24.165.700.014,00
Koreksi Kurang :	Rp	(27.072.989.989,00)
 Saldo per 31-12- 2015	 <b>Rp</b>	 <b>769.423.321.241,46</b>

Mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan diperoleh dari:

#### **1). Penambahan**

Penambahan Gedung dan Bangunan pada tahun 2015 sebesar Rp62.770.011.283,24 berasal dari pelaksanaan kegiatan belanja modal selama tahun 2015.

#### **2). Koreksi Tambah**

Koreksi tambah nilai aset gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp24.165.700.014,00 terdiri dari:

- a) Reklasifikasi sesuai dengan jenis obyek aset sebesar Rp961.404.400, Penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (*reklasifikasi*) untuk bangunan sebesar Rp14.969.014.807,00 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp10.204.692.000,00, pada Dinas Kesehatan sebesar

- Rp2.520.137.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp2.244.185.807.
- b) Hibah yang diterima Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2015, sebesar Rp1.098.551.000,00 (lihat penjelasan Hibah pada Dinas Perikanan angka (2).1).b.a).ii
  - c) Mutasi tambah penyerahan status penggunaan kepada Dinas Pasar sebesar Rp5.561.593.807,00 dengan rincian sebesar Rp1.934.512.000,00 dari Dinas Pekerjaan umum berupa Gedung bangunan kuliner khas Ternate (Gedung Tarano Ate). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 600/1008.a/DPU/Kota Tte/2015 tanggal 15 Mei 2015 dan dari Sekretariat Daerah Sebesar Rp3.627.081.807,00 berdasarkan Berita Acara Nomor 641/02/BAST-ASET/2015 tanggal 7 April 2015.
  - d) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat Penambahan Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari Belanja Dana Tidak Terduga sebesar Rp506.500.000,00 yang terdiri dari Gedung Pos Pemantau Banjir Rp283.100.000,00, Pos Siaga Darurat Bencana Rp63.000.000,00 dan Rehabilitasi Pagar Sekolah Tsanawiyah Al Irsyad sebesar Rp160.400.000,00.
  - e) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.068.636.000,00 dari belanja barang dan jasa yang memenuhi kriteria sebagai penambahan aset pada Dinas Koperasi Rp 49.500.000,00, Kantor Inspektorat berupa pembuatan sekat ruang Kerja dengan nilai sebesar Rp.199.900.000,00 dan belanja perencanaan dan pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 819.236.000,00.

#### Koreksi Kurang

- Koreksi kurang nilai aset gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp27.072.989.989,00 terdiri dari:
- a. Reklasifikasi sesuai dengan jenis obyek aset sebesar Rp20.003.818.182,00
  - b. Mutasi kurang sebesar Rp. 5.561.593.807,00 yang terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 1.934.512.000,00 ke Dinas Pasar berupa Gedung bangunan kuliner khas Ternate (Gedung Tara No Ate) berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 600/1008.a/DPU/Kota Tte/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan Sekretariat Daerah Sebesar Rp3.627.081.807,00 berdasarkan Berita Acara Nomor 641/02/BAST-ASET/2015 tanggal 7 April 2015.
  - c. Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.507.578.000 yang terdiri dari Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp1.285.078.000,00 ke sekolah swasta di Kota Ternate *Lampiran 9* dan hibah Tenda Sarnafil Kaki Lima sebanyak 30 unit senilai Rp222.500.000,00 pada Dinas Pasar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 900/72/DP-KT/2015, tanggal 16 November 2015.

#### Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2015 adalah sebagai

berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2015	Rp	580.690.956.520,52
Realisasi Belanja Modal Tahun 2015	Rp	49.332.257.968,52
Koreksi tambah :	Rp	45.246.095.127,00
Koreksi Kurang :	Rp	(3.201.096.376,00)

Saldo per 31-12- 2015 **Rp 672.068.213.240,04**

Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan diperoleh dari:

**1). Penambahan**

Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan dari Pelaksanaan Program Kegiatan tahun 2015 berupa belanja modal sebesar Rp49.332.257.968,52

**2). Koreksi Tambah**

Koreksi tambah aset sebesar Rp. 45.246.095.127,00 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi karena penyesuaian jenis dan kelompok aset sebesar Rp1.157.445.260,00, ditambah reklasifikasi pertambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk bangunan Sebesar Rp36.681.533.300,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp36.591.733.300,00 dan Dinas Pendapatan Rp89.900.000,00.
- b. Hibah yang diterima Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2015, sebesar Rp2.664.510.000,00 (lihat penjelasan Hibah pada Dinas Perikanan angka (2).1).b.a).ii
- c. Pertambahan Jalan, Irigasi dan jaringan yang diperoleh dari Belanja Dana Tidak Terduga sebesar Rp4.023.870.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2015.
- d. Pertambahan aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp718.736.567,00 dari belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi berupa biaya Perencanaan dan Pengawasan.

**3). Koreksi Kurang**

Mutasi Kurang aset Rp. 3.201.096.376,00 dengan rincian pada Dinas Pekerjaan umum sebesar Rp2.725.479.908,00, Dinas Tata Kota dan Pertamanan Rp284.666.468,00, Dinas Perikanan dan Kelautan Rp1.670.000,00 pada Dinas Pendapatan berupa jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp89.800.000,00 direklasifikasi ke Instalasi karena pada tahun 2014 dicatat sebagai aset Jaringan. Pada Dinas Pariwisata sebesar Rp99.480.000 direklasifikasi ke Gedung dan Bangunan.

Aset Tetap Lainnya

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2015	Rp	15.802.580.526,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2015	Rp	3.277.082.196,50
Koreksi tambah :	Rp	2.251.460.000,00
Koreksi Kurang :	Rp	(1.154.794.960,50)

Saldo per 31-12- 2015 **Rp 20.176.327.762,00**

Mutasi Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

**1) Penambahan**

Penambahan dari Pelaksanaan kegiatan belanja modal tahun 2015 senilai Rp3.277.082.196,50

**2) Koreksi Tambah**

Koreksi tambah aset tetap lainnya pada tahun 2015 sebesar Rp2.251.460.000,00 berupa reklasifikasi dari aset gedung dan bangunan (koreksi Kurang poin a) ke Aset tetap lainnya (aset renovasi) yang terdapat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp664.409.000,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.483.486.000,00 Dinas Koperasi sebesar Rp49.500.000,00 dan dari belanja barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum berupa kegiatan perencanaan teknis rehabilitasi lanjutan kantor eks Gubernur Maluku Utara senilai Rp54.065.000,00.

**3) Koreksi Kurang**

- a. Reklasifikasi karena penyesuaian jenis dan kelompok aset sebesar Rp676.085.000,00
- b. Mutasi kurang berupa Hibah buku pada Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp. 476.894.960,50 kepada sekolah swasta di Kota Ternate, daftar pada penerima hibah termuat pada *Lampiran 10*.
- c. Koreksi kurang aset dengan Harga satuan dibawah Rp1.000.000,00 (*extra comptable*) Aset tetap lainnya sebesar tahun 2015 Rp1.815.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2015	Rp	71.079.379.219,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2015	Rp	00
Koreksi tambah :	Rp	19.991.148.322,79
Koreksi Kurang :	Rp	(51.560.748.107,00)
Saldo per 31-12- 2015	<b>Rp</b>	<b>39.509.779.434,79</b>

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari:

**1) Penambahan**

Tidak ada

**2) Koreksi Tambah**

- Penambahan dari Belanja Modal tahun 2015 sebesar pada Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp5.650.856.000 dan KDP gedung dan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum tahun 2007 sampai tahun 2014

sebesar Rp7.719.778.982,00 dan KDP jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp6.319.255.907,79, Konstruksi Dalam Pengerjaan timbul sebagai akibat belum selesainya pekerjaan pembangunan fisik konstruksi dan belum ada Berita Acara Serah Terima penyelesaian fisik kepada Pengguna Barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Rincian KDP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2015 (Rp)
1.	Bangunan Kantor	2.935.378.982,00
2.	Bangunan Bukan Gedung/Bangunan	4.784.400.000,00
3.	Lainnya Gedung Sekolah	5.650.856.000,00
4.	Jalan	2.289.449.845,00
5.	Jembatan	316.501.763,00
6.	Bangunan	3.610.695.299,79
7.	Air	102.609.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>19.689.890.889,79</b>

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan termuat dalam *Lampiran 11*

- Koreksi tambah aset KDP dari belanja barang dan jasa berupa perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi jembatan sebesar Rp301.257.433,00.

Koreksi Kurang

Koreksi kurang sebesar Rp51.560.748.107,00 pada tahun 2015 merupakan reklasifikasi dari aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset tetap Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi dilakukan karena kegiatan pekerjaan fisik konstruksi untuk aset tersebut telah diselesaikan seluruhnya pada tahun 2015. Berikut rincian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan:

No	NAMA SKPD	per 31 Desember 2015 (Rp)
1	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	<b>46.796.425.300,00</b>
	1. Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap I	33.660.164.000,00
	2. Jalan Kelurahan Makassar Timur	2.585.119.300,00
	3. Gedung TASBAQ	949.975.000,00
	4. Perencanaan Teknis Pembangunan Ruko Utara dan Selatan II	73.000.000,00
	5. Perencanaan Teknis Pasar Sasa	2.600.000,00
	6. Ruko Bagian Utara II (Multy Year)	3.734.724.000,00
	7. Ruko Bagian Selatan II (Multy Year)	2.823.393.000,00
	8. Pemasangan Paving Pelataran Pasar Percontohan	199.000.000,00
	9. Lanjutan Pasar Percontohan	1.986.625.000,00
	10. Gudang Coldbox (Higienis)	594.375.000,00
	11. Saluran Jl. Pahlawan Revolusi - Kel. Gamalama	147.450.000,00

2	<b>Dinas Pendidikan Nasional</b> 1. Pembangunan Bertingkat SDN Salero 2 2. Perencanaan Tekhnis SDN Salero 2 3. Pengawasan Tekhnis SDN Salero 2 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 5. Perencanaan Teknik SMKN 1 6. Pengawasan Teknik SMKN 1	<b>2.520.137.000,00</b> 971.600.000,00 32.187.000,00 17.290.000,00 817.660.000,00 667.800.000,00 9.050.000,00 4.550.000,00
3	<b>Sekretariat Daerah</b> Gedung Kantor Dinas Pasar	<b>2.244.185.807,00</b>

Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

No	NAMA SKPD	Konstruksi Dalam Pengerjaan s.d. 31 Desember 2015 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum	26.693.262.212,79
2.	Dinas Kesehatan	1.418.217.632,00
3.	Dinas Pendidikan Nasional	5.940.786.000,00
4.	Kantor Perindustrian dan Perdagangan	4.784.400.000,00
5.	Kantor Kecamatan Batang Dua	605.400.000,00
6.	Kantor Kecamatan Hiri	67.713.590,00
	<b>Jumlah</b>	<b>39.509.779.434,79</b>

#### Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan). Berikut rincian akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2015:

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	109.152.945.281,00	93,570,275,850,00
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	359,293,619,525,00	333,085,164,823,00
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	318,559,450,040,00	277,903,469,565,00
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>787.006.014.846,00</b>	<b>706,712,359,913,00</b>

Apabila disandingkan nilai perolehan aset tetap, maka akan diperoleh nilai buku



untuk masing-masing aset tetap per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Tanah		228.381.464.460,00
Peralatan dan Mesin	175.889.138.533,50	
Akum. Peny. Peralatan dan Mesin	<u>(109.152.945.281,00)</u>	
Nilai Buku Peralatan dan Mesin		66.736.193.252,50
Gedung dan Bangunan	769.423.321.241,46	
Akum Peny. Gedung dan Bangunan	<u>(359,293,619,525,00)</u>	
Nilai Buku Gedung dan Bangunan		410.129.701.716,46
Jalan, Irigasi dan Jaringan	672.068.213.240,04	
Akum Peny. Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>(318,559,450,040,00)</u>	
Nilai Buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan		353.508.763.200,04
Aset Tetap lainnya	20.176.327.762,00	
Akum Peny. Aset tetap lainnya	<u>0,00</u>	
Nilai Buku Aset Tetap Lainnya		20.176.327.762,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		39.509.779.434,79
<b>Total Aset Tetap</b>		<b>1.118.442.229.825,00</b>

Hal-hal penting yang berkaitan dengan Aset Tetap dapat di informasikan sebagai berikut:

1. Terdapat Aset berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Ternate namun belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Halbar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.11 tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate. Proses penyelesaian aset Kabupaten Halmahera Barat dengan Pemerintah Kota Ternate telah dilakukan pertemuan antara Bupati Halbar dan Walikota Ternate pada tanggal 10 Maret 2016, dan telah dilakukan inventarisasi atas aset tersebut sebagaimana daftar *Lampiran 12*.
2. Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Ternate melakukan lelang terbatas sebanyak 23 unit kendaraan operasional yang telah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah, dengan nilai perolehan sebesar Rp2.400.467.532,00. Dari penjualan 23 unit kendaraan tersebut Pemerintah Daerah Kota Ternate memperoleh pendapatan atas penjualan aset kendaraan bermotor sampai 31 Desember 2015 sebesar Rp391.500.000,00 dan telah disetor ke kas daerah

#### VI.14.4. Aset Lainnya

Pos Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp71.997.808.138,65 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
- Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Rugi	413.499.567,00	664.601.671,00
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	29.874.546.000,00	29.874.546.000,00
- Aset Tak Berwujud	568.142.858,00	1.048.037.680,00
- Aset Lain-lain	40.967.519.713,65	37.080.444.713,65
- Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	174.100.000,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>71.997.808.138,65</b>	<b>68.667.630.064,65</b>

1. Tagihan jangka panjang TP TGR

Nilai saldo Tagihan jangka panjang TP TGR pada tahun 2015 adalah sebesar Rp413.499.567,00. Nilai tersebut merupakan tagihan yang belum ada SKTJM maupun Surat Pembebanan sehingga belum diketahui pasti kapan jatuh temponya.

Sedangkan nilai piutang sebesar Rp229.272.104,00 merupakan tagihan yang sudah ada SKTJM dan telah diketahui jatuh temponya, dimana nilai tersebut merupakan tagihan yang sudah jatuh tempo serta yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan ke depan, atas hal ini tagihan tersebut telah direklas menjadi aset lancar sebagai bagian lancar tagihan TP TGR.

Rincian dari tagihan TP TGR dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian Tuntutan Perbendaharaan	2015 (Rp)	2014 (Rp)	Reklasifikasi ke aset Lancar	Setoran ke Kas daerah
1	Kas yang dicuri TA 2011 di SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	105.581.293,00	105.581.293,00		
2	Kas yang dicuri pada TA 2011 di SKPD Kecamatan Ternate Selatan	64.260.008,00	64.260.008,00		
3	Penggunaan uang belanja untuk kepentingan pribadi di SKPD Kecamatan Ternate Tengah		154.050.000,00	154.050.000,00	
4	Penggunaan uang belanja TA 2011 untuk kepentingan pribadi an. Manta, Bendahara SKPD Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi	243.658.266,00	243.658.266,00		
5	Penggunaan uang belanja TA.2012 untuk kepentingan pribadi an. Mantan bendahara Kantor KB		59.135.642,00	38.305.642,00	20.830.000,00
6	Kehilangan kas pada Kecamatan Hiri Tahun 2012		18.926.462,00	17.926.462,00	1.000.000,00
7	TGR atas tindak lanjut temuan perjalanan Dinas oleh BPK thn 2011 & 2012 ( yg sudah ada SKTJM)		18.990.000,00	18.990.000,00	

Jumlah	413.499.567,00	664.601.671,00	229.272.104,00	21.830.000,00
--------	----------------	----------------	----------------	---------------

2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Pos Kemitraan dengan pihak Ketiga sebesar Rp29.874.546.000,00 terdiri dari nilai Aset milik Pemerintah Kota Ternate yang diperuntukkan bagi Pembangunan *Waterboom* kerjasama dengan PT. Indoteranusa dan PT. Jati Luhur Gemilang. Pengakuan aset milik Pemerintah Kota Ternate dengan pihak ketiga ini mengacu pada isi perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Ternate dan pihak terkait, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

No.	Aktiva Bangun Guna Serah	AKTIVA YANG DIAKUI (Rp.)		KETERANGAN
		Bangunan	Tanah Rp.	
1.	<u>Bangunan Waterboom</u>		3.350.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate</li> <li>- Bangunan dibangun melalui kerjasama dengan PT. Indoteranusa dengan masa Pengembalian 30 tahun</li> <li>- Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate yang telah memiliki Sertifikat status Hak Pengelolaan No. 01 tanggal 25 Oktober tahun 2004 seluas 38.457 M2 dan diatas tanah tersebut terdapat sertifikat HGB atas Nama PT. Jati Luhur Gemilang No. 26 tanggal 24 Nopember 2004 seluas 33.073 M2</li> <li>- Bangunan dibangun melalui kerjasama dengan PT. Jatiluhur Gemilang dengan masa Pengembalian 25 tahun</li> </ul>
2	<u>Mall JatiLand</u>		26.524.546.000,00	

3. Aset Tak Berwujud

Penambahan aset tak berwujud pada tahun 2015 sebesar Rp151.660.000 yang berasal dari belanja *software* pada Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp59.660.000 dan pada Bappeda sebesar Rp92.000.000,00. Nilai tersebut kemudian ditambahkan dengan saldo tahun 2014 sebesar Rp1.048.037.680,00 yang merupakan nilai hasil pemisahan antara aset tak berwujud dengan aset lain-lain sebagai akibat dari penerapan kebijakan akuntansi akrual. Sehingga saldo awal aset tak berwujud tahun 2015 sebesar Rp1.199.697.680,00. Atas nilai tersebut, dilakukan amortisasi selama tahun 2015 sebesar Rp631.554.822,00, sehingga nilai buku per 31 Desember 2015 adalah Rp568.142.858,00 dapat dilihat pada *Lampiran 13*.

4. Aset lain-lain

- a) Aset Lain-lain Tahun 2015 sebesar Rp40.967.519.713,25 terdiri dari:
- 1) aset dalam Kondisi Rusak Berat, sedang dalam Proses Usulan

Penghapusan, Hilang sebesar Rp33.935.568.712,38

- 2) Aset Renovasi sebesar tahun 2015 Rp3.095.376.000,00 adalah Biaya Pemeliharaan/renovasi yang diperuntukkan untuk bangunan Eks Kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara, yang sampai saat ini status kepemilikannya masih di *claim* oleh 3 (tiga) Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kabupaten Halbar dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
  - 3) penambahan aset Renovasi dari Dinas koperasi sebesar Rp49.500.000,00 yang pada tahun 2014 dicatat sebagai penambahan aset gedung dan bangunan, sedangkan gedung dan bangunan tersebut merupakan aset Kementerian Koperasi yang belum diserahkan;
  - 4) Belanja Modal tanah hasil pengadaan TA 2015 sebesar Rp3.847.075.000,00 pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah yang tujuannya akan diserahkan kepada pihak ketiga, namun sampai 31 Desember 2015 belum diserahkan;
  - 5) Belanja barang jasa-bibit sebesar Rp40.000.000,00 pada Dinas Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan yang merupakan belanja bibit ayam yang dikelola oleh Dinas Dinas Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- b) Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp174.100.000,00 adalah hasil reklas dari kas di kas daerah di karenakan dana tersebut sampai 31 Desember 2015 masih menjadi barang bukti yang ditahan oleh Kejari ternate.

## VI.15 KEWAJIBAN

### VI.15.1. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban jangka pendek Pemda Kota Ternate per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp14.310.827.892,00 dan Rp454.863,00 mengalami penambahan sebesar Rp14.310.373.029,00 yang berasal dari:

- a. Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang sampai dengan akhir tahun belum di setor ke kas Negara sebesar Rp3.170.458.707,00. Rincian hutang PFK adalah sebagai berikut :

SKPD	Jumlah
BUD	3.094.588.843,00
Dinas Pendidikan	14.084.386,00
Dinas Perhubungan	34.400.500,00
Sekretariat Daerah	18.195.982,00
DPKAD	2.150.723,00
Badang Penanggulangan Bencana	7.038.273,00
<b>Total</b>	<b>3.170.458.707,00</b>

- b. Utang belanja sebesar Rp6.051.284.702,00

Saldo Utang Belanja pada TA 2015 sebesar Rp6.051.284.702,00 berasal dari:

- 1) Utang Belanja Barang pada Dinas Kebersihan berupa pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sampai dengan akhir tahun 2015 belum dibayar sebesar Rp104.606.387,00;

- 2) Utang Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan berupa tunjangan profesi guru yang sampai akhir tahun 2015 belum dibayarkan atau disalurkan kepada masing-masing guru sebesar Rp5.946.678.315,00 (setelah dipotong pajak), dengan rincian Tunjangan Profesi Guru Triwulan IV Tahap I sebesar Rp5.896.690.620,00 dan Tunjangan Profesi Guru Triwulan III Tahap IV sebesar Rp49.987.695,00.
- c. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp5.089.084.483,00 merupakan kewajiban kepada pihak ketiga (rekanan) yang sampai dengan akhir tahun 2015 belum dibayar atau disalurkan kepada masing-masing rekanan.

#### VI.15.2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban jangka panjang Pemda Kota Ternate per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar 0,00.

#### VI.16. EKUITAS

Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Ternate. Akun Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

No	Uraian	31 Des 2015 (Rp)	31 Des 2014 (Rp)
1	Ekuitas	1.248.434.805.872,24	1.914.667.729.425,98
	Jumlah	1.248.434.805.872,24	1.914.667.729.425,98

### LAPORAN ARUS KAS

#### VI.17. KOMPONEN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2015. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

##### VI.17.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Ternate dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp136.091.101.282,64. Untuk Tahun Anggaran 2015, aktivitas operasi terutama terdiri dari:

##### VI.17.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2015
1	Pajak Hotel	2.265.325.907.00
2	Pajak Restoran	5.780.979.996.00
3	Pajak Hiburan	944.296.091.00
4	Pajak Reklame	1.767.014.333.00
5	Pajak Penerangan Jalan	15.580.127.492.00
6	Pajak Parkir	94.589.468.00
7	Pajak Air Tanah	559.956.532.00
8	pajak mineral bukan logam	1.975.107.812.00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	3.020.765.101.00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.575.447.850.00
<b>Jumlah</b>		<b>34.563.610.582.00</b>

#### VI.17.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>10.013.195.050.00</b>
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.846.825.500.00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	1.233.500.000.00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	6.124.669.550.00
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	788.100.000.00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.100.000.00
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.763.248.000.00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	417.946.000.00
2	Retribusi Terminal	305.800.000.00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	381.461.000.00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	98.335.000.00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	193.530.000.00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	366.176.000.00
<b>III</b>	<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>	<b>3.292.856.336.00</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.261.296.023.00
2	Retribusi Izin Gangguan	926.555.313.00
3	Retribusi Izin Trayek	16.965.000.00
4	Retribusi Izin Perikanan	88.040.000.00

	<b>Jumlah</b>	<b>15.069.299.386,00</b>
--	---------------	--------------------------

### VI.17.1.3 Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan adalah sebesar Rp100.231.200,00 berasal dari penerimaan deviden PT BPR Syariah.

### VI.17.1.4. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

NO	Uraian	Realisasi 2015
1	Penerimaan Jasa Giro	415.428.801,10
2	Penerimaan Bunga Deposito	2.934.828.765,81
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	12.663.714,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	4.334.680.273,47
5	Pendapatan yang ditangguhkan tahun lalu	24.311.500,00
6	Pendapatan dana kapitasi	3.081.262.384,70
<b>JUMLAH</b>		<b>10.803.175.438,08</b>

Pendapatan dana kapitasi merupakan realisasi arus masuk kas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

### VI.17.1.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2015
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	7.779.726.000,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	1.714.274.000,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	857.137.000,00
4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh	5.587.591.800,00
<b>JUMLAH</b>		<b>15.938.728.800,00</b>

#### VI.17.1.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2015
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	39.882.000,00
2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	641.788.837,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	10.546.292.523,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	183.018.600,00
5	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	520.245.433,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	3.276.965.500,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	8.044.400,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.216.237.293,00</b>

#### VI.17.1.7. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2015 pelaporan sebesar Rp547.124.097.000,00.

#### VI.17.1.8. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2015 pelaporan sebesar Rp55.368.190.000,00.

#### VI.17.1.9. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2015
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	78.104.765.000,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00
3	Dana Insentif Daerah	18.424.092.000,00
4	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	725.574.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>97.254.431.000,00</b>

#### VI.17.1.10. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan, yang terdiri dari:



No	Uraian	Realisasi 2015
1	PKB	7.138.061.293.00
2	BBNKB	890.722.428.00
3	PBBKB	6.824.692.392.00
4	P3ABT	2.195.111.648.00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	8.688.722.610.00
<b>Jumlah</b>		<b>25.737.310.371.00</b>

#### **VI.17.1.11. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Hibah**

Arus Masuk Kas yang telah diterima dan di setorkan ke kas daerah selama tahun pelaporan, merupakan penerimaan dalam bentuk hibah dari pemerintah Propinsi Maluku Nihil.

#### **VI.17.1.12. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2015 sebesar Rp414.729.923.791,00. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honor panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

#### **VI.17.1.13. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun anggaran 2015 sebesar Rp208.510.954.114,44. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk (termasuk benih unggul), penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Ternate. Selama Tahun Anggaran 2015, Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dari Rekening Kas Daerah adalah sebesar Rp206.209.175.775,00 dan dari rekening yang disetarakan dengan Kas Daerah (Rekening FKTP untuk Dana Kapitasi) adalah sebesar Rp2.301.778.339,44.

#### **VI.17.1.14. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari

pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2015 sebesar Rp31.500.000.000,00 serta sebesar Rp14.110.450.100,00 yang berasal dari hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

#### **VI.17.1.15. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial**

Arus keluar kas dari Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2015 sebesar Rp5.400.500.000,00. Pengeluaran arus kas ini diperuntukkan bagi pemberian bantuan kepada Organisasi kemasyarakatan dan Keagamaan.

#### **VI.17.1.16. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2015 sebesar Rp6.070.200.000,00,

#### **VI.17.1.17. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2015 sebesar Rp813.109.720,00. Pengeluaran arus kas ini di peruntukan bagi pemberian bantuan keuangan untuk partai politik .

#### **VI.17.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Aset Non Keuangan**

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Ternate kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini untuk tahun 2015 ada sebesar (Rp155.693.817.734,00).

##### **VI.17.2.1. Arus Masuk Kas atas Penjualan Peralatan dan Mesin**

Arus masuk kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan peralatan dan mesin yang telah dihapuskan dari Neraca melalui tata cara penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan dengan nilai sebesar Rp391.500.000,00.

##### **VI.17.2.2. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah**

Arus keluar kas dari Perolehan tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2015 pelaporan dengan nilai sebesar Rp8.654.567.750,00.

#### **VI.17.2.3. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin**

Arus keluar kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin. Selama tahun anggaran 2015 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp26.201.398.536,00.

#### **VI.17.2.4. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan**

Arus keluar kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama tahun anggaran 2015 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp62.770.011.284,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah dan gedung kantor.

#### **VI.17.2.6 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Arus keluar kas dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp49.332.257.968,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota.

#### **VI.17.2.7. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya**

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa buku dan barang perpustakaan, dan barang bercorak seni dan budaya. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.277.082.196,00.

#### **VI.17.2.8. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya**

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Lainnya. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan seperti tagihan jangka panjang,

kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tidak berwujud.

Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp0,00.

### **VI.17.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp0,00.

### **VI.17.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris**

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Ternate. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2015 adalah Rp3.170.003.844,00. Rincian arus kas ini terdiri dari:

#### **VI.17.4.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, nilai penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp68.522.785.092,00 yang terdiri dari (i) pungutan Taperum, IWP, dan Askes yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

#### **VI.17.4.2. Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, nilai penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp65.352.781.248,00 yang terdiri dari pungutan Taperum, IWP, dan Askes yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

### **VI.17.5. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran**

Nilai saldo awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2015 sebesar Rp18.227.820.668,70 tidak sama dengan saldo akhir kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2014 Rp18.401.920.668,70. Hal tersebut dikarenakan terdapat koreksi atas saldo awal sebesar Rp174.100.000,00 yang merupakan kas yang dipakai sebagai barang bukti di Kejari Ternate, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kas.

#### **VI.17.6. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran**

Nilai saldo akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2015 sebesar Rp1.795.108.061,34. Nilai tersebut terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp58.345.089,08, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp414.298.605,00 serta Kas di FKTP sebesar Rp1.322.464.367,26.

#### **VI.17.7. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan**

Nilai saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp5.536.000,00 merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.

#### **VI.17.8. Total Kas**

Total kas sebesar Rp1.800.644.061,34 merupakan penjumlahan dari Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.795.108.061,34. Dan Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp5.536.000,00.

## **BAB VII**

### **INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **VII.1. GAMBARAN UMUM KOTA TERNATE**

Kota Ternate berdiri sejak tanggal 27 April 1999 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 1999. Karena letak geografisnya yang berbatasan dengan Ibukota Jakarta, maka Kota Ternate berfungsi sebagai daerah permukiman, industri dan perdagangan.

Kota Ternate mempunyai luas wilayah 162,03 km<sup>2</sup> luas lautan 5.547,55 Km<sup>2</sup>, letak geografis 0 – 2 derajat lintang utara dan 126 – 128 derajat bujur timur, dengan batas wilayah sebelah utara laut Maluku, sebelah selatan laut Maluku bagian selatan, sebelah timur selat Halmahera, sebelah barat laut Maluku barat, Pemerintah Kota ternate terdiri atas 7 Kecamatan dan 77 kelurahan.

#### **VII.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Kota Ternate yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 11 Lembaga Teknis, 15 Dinas, 2 BUMD, 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

1. Lembaga Teknis terdiri dari:
  - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
  - 3) Inspektorat
  - 4) Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
  - 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
  - 6) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
  - 7) Kantor Arsip Daerah
  - 8) Kantor Perpustakaan Daerah
  - 9) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
  - 10) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
  - 11) Satuan Polisi Pamongpraja
  
2. Dinas Daerah terdiri dari:
  - 1) Dinas Kesehatan
  - 2) Dinas Pendidikan
  - 3) Dinas Pertanian
  - 4) Dinas Tata Kota
  - 5) Dinas Pekerjaan Umum
  - 6) Dinas Pemuda, Olah Raga
  - 7) Dinas Budaya dan Pariwisata
  - 8) Dinas Perhubungan
  - 9) Dinas Ketenagakerjaan dan sosial

- 10) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
  - 11) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - 13) Dinas Kebersihan dan Pertamanan
  - 14) Dinas Pemadam Kebakaran
  - 15) Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi
  - 16) Dinas Pasar
  - 17) Dinas Koperasi
  - 18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Kecamatan terdiri atas:
- 1) Kecamatan Ternate Utara
  - 2) Kecamatan Ternate Selatan
  - 3) Kecamatan Ternate Tengah
  - 4) Kecamatan Pulau Ternate
  - 5) Kecamatan Batang Dua
  - 6) Kecamatan Hiri
  - 7) Kecamatan Moti
4. BUMD terdiri atas:
- 1) PDAM Kota Ternate
  - 2) PT. Ternate Bahari Berkesan (Holding Company)

## **BAB VIII PENUTUP**

Pemerintah Kota Ternate memiliki 41 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasi dari 41 SKPD entitas akuntansi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate TA 2015 diharapkan mampu memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan manajemen, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kota Ternate.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate TA 2015.